

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025

TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 merupakan laporan tahun keenam dari implementasi RPD Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026 dan juga sebagai konsekuensi yuridis dari amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode dan teknik penyusunan LKjIP ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Aparatur Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Hendaknya hasil ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk perbaikan kinerja ke depan. Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya menjadi bahan introspeksi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dimasa mendatang. Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 ini dijadikan media untuk membangun kebersamaan dan sinergitas berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik, bagi nusa dan bangsa.

Akhirnya kepada Allah Subhanahuwata'ala mohon ridho, taufik dan hidayah-Nya dan bagi semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih.

Tebing Tinggi, 03 Maret 2026

BUPATI EMPAT LAWANG

JONCIK MUHAMMAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
IKHTISAR EKSEKUTIF v
BAB I 1
PENDAHULUAN 2
A. MAKSUD DAN TUJUAN 3
B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI 4
C. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI 7
BAB II 12
PERENCANAAN KINERJA 13
A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2024–2026 13
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 17
BAB III 20
AKUNTABILITAS KINERJA 21
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 21
B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG 23
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 85
BAB IV 96
PENUTUP 97
LAMPIRAN 100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Lembaga Teknis Daerah 1
Tabel 1. 2 Dinas Daerah 2
Tabel 1. 3 Luas wilayah menurut Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang 4
Tabel 1. 4 Topografi Kabupaten Empat Lawang 6
Tabel 1. 5 Keterkaitan Strategi dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang 10
Tabel 2.1 Indikator Tujuan 14
Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran 15
Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Sasaran 15
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 17
Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025 21
Tabel 3. 2 Dimensi Penilaian 27
Tabel 3. 3 Nilai SPI 2021 – 2024 30
Tabel 3. 4 Target Dan Realisasi Iku Tahun 2023, 2024 Dan Tahun 2025 33
Tabel 3. 5 Target dan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Empat Lawang tahun 2025 39
Tabel 3. 6 Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang 43
Tabel 3. 7 Indikator pencapaian kinerja pendidikan tahun 2025 45
Tabel 3. 8 Jumlah Desa Berdasarkan Status di Empat Lawang 58
Tabel 3. 9 Investor yang ada di Kabupaten Empat Lawang 75
Tabel 3. 10 Rencana Investasi PMDN dan PMA Tahun 2025 76
Tabel 3. 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025 91

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Nilai SPI Kabupaten Empat Lawang dari tahun 2021-2025 30
Grafik 3. 2 Angka Harapan Hidup Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang 38
Grafik 3. 3 Target dan Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 39
Grafik 3. 4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang 42
Grafik 3. 5 Nilai Indeks Desa Membangun 2024-2025 57
Grafik 3. 6 Perkembangan Jumlah Investor 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang.....5
Gambar 3. 1 Pemberian Bantuan Alat Bantu Kepada Disabilitas 51
Gambar 3. 2 Pemberian Bantuan makanan pada Lansia dan anak kurang mampu atau terlantar 51
Gambar 3. 3 Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif..... 52
Gambar 3. 4 Pemberian Bantuan Pasca Bencana 52
Gambar 3. 5 Pemberian Bantuan Non Tunai beresiko Stunting 53
Gambar 3. 6 Program Pengelolaan Persampahan 83

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024– 2026 melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Kabupaten Empat Lawang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Kabupaten Empat Lawang dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain adalah :

1) Aparatur dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas harus mengenal SAKIP;
2) Perlu dilakukan sebelum menyusun RENJA Perangkat Daerah (PD) semua indikator kegiatan disesuaikan dengan *Cascading* Perangkat Daerah (PD) masing – masing;
3) Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi harus mempunyai persepsi yang

sama dalam perumusan capaian; dan

4) Kinerja Perangkat Daerah (PD) disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPD dengan demikian pimpinan Perangkat Daerah (PD) harus berkomitmen dengan penyusunan RENJA capaian dengan *Cascading*.

Jumlah Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp. 1.480.624.922.419,00** dengan Realisasi Pendapatan sebesar **Rp. 1.098.778.612.464,44** sedangkan Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.494.093.172.356,00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 1.096.588.488.724,00**

Tebing Tinggi, 03 Maret 2026.
Bupati Empat Lawang,



JONCIK MUHAMMAD



BAB I

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang membentuk perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Struktur perangkat daerah tersebut terdiri dari :

a) **SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD**
b) **Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :**

Tabel 1. 1 Lembaga Teknis Daerah

No.	Perangkat Daerah
1.	Inspektorat
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.	Badan Pendapatan Daerah
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Rumah Sakit Umum Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

c) Dinas Daerah, terdiri dari :

Tabel 1. 2 Dinas Daerah

No.	Perangkat Daerah
1.	Dinas Kesehatan
2.	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
3.	Dinas Lingkungan Hidup
4.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7.	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
8.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Pertanian
11.	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Pariwisata
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Dinas Ketahanan Pangan
20.	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22.	Dinas Perikanan
23.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

d) Lembaga Yang Diatur Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tersendiri:

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Empat Lawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

- Lembaga teknis, terdiri dari :
  1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
  2. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pembentukan dan penataan kelembagaan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

LKjIP tidak hanya menyajikan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga menekankan pada pencapaian hasil (outcome) dan manfaat (impact) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Menyajikan informasi capaian kinerja secara terukur dan transparan.
2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis daerah.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja.
4. Menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

5. Meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota dari Provinsi Sumatera Selatan yang terletak antara antara pada 3˚25 – 4˚15' LintangSelatan dan 102˚37' – 103˚45' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.256,44 km².

Adapun batas wilayah Kabupaten Empat Lawang sebagi Berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Musi Rawas
b. Sebelah Timur : Kabupaten Lahat
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Lahat dan Kabupaten Bengkulu Selatan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu

Secara umum wilayah administrasi Kabupaten Empat Lawang terdiri dari 10 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 147 Desa. Sepuluh wilayah Kecamatan Kabupaten Empat Lawang yang dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 1. 3 Luas wilayah menurut Kecamatan, Kabupaten Empat Lawang

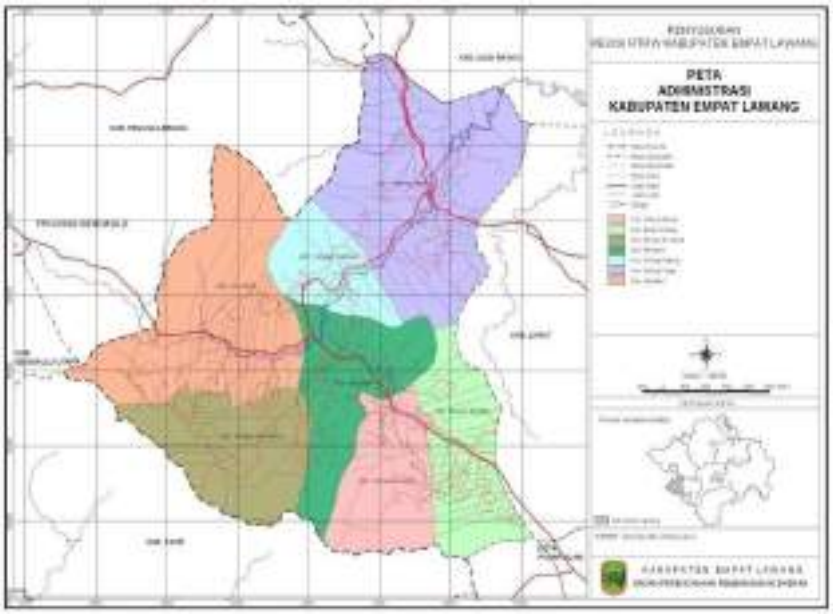
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)
1	Muara Pinang	193,72	8,59
2	Lintang Kanan	264,55	11,72
3	Pendopo	192,86	8,55
4	Pendopo Barat	95,20	4,22
5	Pasemah Air Keruh	217,90	9,66
6	Ulu Musi	329,62	14,61
7	Sikap Dalam	230,76	10,23
8	Talang Padang	140,90	6,24
9	Tebing Tinggi	362,93	16,08
10	Saling	228,00	10,10

	Jumlah/Total	**2.256,44**	**100**

Sumber : Empat Lawang Dalam Angka Tahun 2024

Ditinjau dari lokasinya yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Provinsi, sebenarnya Kabupaten Empat Lawang memiliki posisi yang strategis, karena dengan posisi yang semacam itu, Kabupaten Empat Lawang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi, atau dengan kata lain sebagai pintu gerbang bagi arus transportasi darat di Pulau Sumatera, paling tidak bagi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, khususnya sebagai penghubung paling efektif antara Kota Bengkulu dengan Kota Palembang.

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kabupaten Empat Lawang



2. Topografi

Kabupaten Empat Lawang terletak pada ketinggian wilayah yang bervariasi, antara 150 meter sampai dengan 700 meter dari atas permukaan laut. Wilayah barat- timur memiliki ketinggian antara 150 meter sampai dengan 450 meter di

atas permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 300 meter sampai dengan 450 meter di atas permukaan laut mencakup areal seluas 64%. Pada wilayah selatan timur merupakan wilayah di daerah pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 600 meter sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kearah utara timur, memiliki ketinggian antara 150 meter sampai dengan 250 meter di atas permukaan laut, relatif datar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kabupaten Empat Lawang sebagian besar bergelombang atau berbukit. Daerahyang bergelombang yaitu Tebing Tinggi dan Ulu Musi. Dengan keadaan topografi yang bergelombang sehingga sebagian wilayahnya sebagai lahan konservasi.

Tabel 1. 4 Topografi Kabupaten Empat Lawang

No.	Kecamatan	Bentuk Wilayah
1.	Muara Pinang	Berbukit sampai bergunung
2.	Pendopo	Berbukit
3.	Ulu Musi	Berombak sampai bergelombang
4.	Tebing Tinggi	Berbukit
5.	Lintang kanan	Berbukit
6.	Talang Padang	Berbukit
7.	Pasemah Air keruh	Berbukit sambai bergunung
8.	Pendopo Barat	Berbukit
9.	Sikap Dalam	Berombak sampai Bergelombang
10	Muara saling	Berbukit

Kabupaten Empat Lawang beriklim tropis basah dengan curah hujan antara 97 – 386 mm/hari sepanjang tahun. Curah hujan bervariasi dengan Bulan November sebagai bulan dengan curah hujan terbesar, sedangkan pada Bulan Juni merupakan bulan dengan curah hujan terendah sepanjang tahun. Suhu udara di Kabupaten Empat Lawang berkisar 30,47º C – 32,16º C. Pada bulan-bulan tertentu, seperti Bulan April, suhu udara minimum mencapai rata-rata 22,7º C. Sedang pada Bulan Januari, suhu udara maksimum bisa mencapai 37,1º C. Kelembaban udara di wilayah Kabupaten Empat Lawang berkisar antara 66,85 – 90,20 R.h. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan Desember, sementara

kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Agustus.

Wilayah Kabupaten Empat Lawang merupakan daerah yang dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar adalah Sungai Musi, Sungai Air Lintang, Sungai Air Keruh dan Sungai Air Saling. Persediaan air sungai tersebut tergantung pada mata air dari Bukit Barisan.

C. KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Administrasi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut mengacu kepada PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dibentuk dan ditetapkan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang yang terdiridari :

1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Empat Lawang.
2. 21 Dinas Daerah.
3. 7 Badan (Lembaga Teknis Daerah), termasuk Inspektorat setara Badan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Isu Strategis Daerah

Dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Empat Lawang sehingga memunculkan isu-isu strategis pembangunan. Isu Strategis Daerah Empat Lawang dilihat dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Isu yang bersumber dari Dunia Internasional

a) Dengan berakhirnya MDGs (*Millenium Development Goals*) dan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, ternyata ada beberapa Tujuan Pembangunan belum optimal pencapaiannya sehingga perlu ditingkatkan dalam RPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026, seperti:

- Mengakhiri kemiskinan.
- Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- Pendidikan yang berkualitas dan pembelajaran seumur hidup.

- Memastikan kehidupan yang sehat.
- Menjamin ketahanan pangan dan gizi yang baik.
- Akses universal terhadap air dan sanitasi.
- Perlunya ketahanan energi secara berkelanjutan.
- Menciptakan lapangan kerja, penghidupan yang berkelanjutan, danpertumbuhan yang adil.
- Mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Memastikan tata kelola pemerintahan dan institusi yang efektif.
- Memastikan masyarakat yang stabil dan damai.
- Menciptakan lingkungan hidup dan katalisator pembiayaan jangka Panjang secara global.

Kedua belas tujuan pembangunan tersebut merupakan sebuah keberlanjutan dari program internasional MDGs yang berisi delapan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,Pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender, menurunkan angka kematian anak, dan meningkatkan kesehatan ibu. Kemudian memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Lalu, memastikan kelestarian lingkungan hidup dan mengembangkan kemitraan global.Tentunya dalam perjalanannya ke-12 tujuan pembangunan pasca MDG's ini berimplikasi terhadap pembangunan jangka menengah Kabupaten Empat Lawang.

b) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan MEA 2015, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basisproduksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi. Kesiapan Indonesia perlu dilakukan di segala bidang secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian nasional dan daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja Indonesia akan menjadi aset berharga bagi Indonesia untuk meraih keberhasilan MEA bagi kepentingan

pembangunan nasional. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional yang dimulai pada tahun 2015. Berikut karakteristik kunci dari perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015:

- Pasar tunggal dan produksi dasar.
- Sebuah ekonomi yang sangat kompetitif wilayah.
- Sebuah wilayah ekonomi yang adil pengembangan.
- Sebuah wilayah sepenuhnya terintegrasi ke dalam perekonomian global.

2) Isu yang bersumber dari regional

Kabupaten Empat Lawang sebagai jalur lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa dilepaskan pada isu yang bersumber dari regional. Isu yang bersumber dari regional adalah banyaknya penduduk pendatang lewat Kabupaten Empat Lawang menuju daerah lain di Provinsi Sumatera Selatan, juga letak geografis Kabupaten Empat Lawang yang berada di hulu sungai Musi dan bercurah hujan tinggi.

3) Isu yang bersumber dari Dalam Kabupaten Empat Lawang

Isu yang bersumber dari dalam Kabupaten Empat Lawang tidak bisa dilepaskan dengan kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan maupun LingkunganHidup Strategis. Oleh sebab itu maka dalam menganalisis Isu-isu strategis untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari Kabupaten Empat Lawang diawali dengan menelaah kondisi kondisi umum daerah, baik struktur ruang, pola ruang, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2) Keterkaitan Strategi dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang

Tabel 1. 5 Keterkaitan Strategi dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Empat Lawang

Strategi	Arah Kebijakan
Strategi 1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat **Strategi 1.1.2** Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan daerah	1. Optimalisasi pendanaan mandatori, pusat dan lainnya untuk penguatan SDM melalui akses pendidikan formal/non formal dan kesehatan serta kesetaraan gender 2. Peningkatan inovasi dalam pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui pendanaan kolaboratif 3. Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinana dan keluarga berisiko stunting
Strategi 1.1.3 Meningkatnya standar hidup layak	Peningkatan integrasi program pemerintah pusat dan lainnya dalam peningkatan kualitas SDM usia produktif yang berdaya saing
Strategi 1.1.4 Pengurangan beban rumah tangga miskin	Transformasi Pola pikir dan perilaku masyarakat guna peningkatan kualitas hidup masyarakat, percepatan penurunan kemiskinan dan keluarga berisiko stunting
Strategi 2.2.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ex-transmigrasi **Strategi 2.2.2** Meningkatnya pembangunan desa	Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir
Strategi 2.2.3 Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok	Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan
Strategi 2.2.4 Meningkatnya kemudahan akses transportasi antar wilayah **Strategi 2.2.5** Meningkatnya layanan infrastruktur dalam kondisi baik **Strategi 2.2.6** Meningkatnya peluang investasi daerah	Peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan guna mendorong interkoneksi antar wilayah, Pertanian dan Sektor Potensial pendukung perekonomian lainnya
Strategi 2.2.7 Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan	1. Peningkatan rantai nilai (value chain) tata niaga perdagangan

	2. Penciptaan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sektor pertanian dan sektor potensial lainnya dari hulu hingga hilir
Strategi 2.2.8 Meningkatya pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan yang pro enviroment
Strategi 3.3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1. Akselerasi reformasi birokrasi yang didukung ASN profesional dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan digitaliasi pelayanan publik 2. Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil
Strategi 3.3.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan ASN yang inovatif, cerdas dan kreatif dengan memanfaatkan besarnya upaya pemerintah pusat dalam reformasi birokrasi
Strategi 3.3.3 Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Percepatan pelaksanaan revolusi mental ASN melalui Gerakan Indonesia Melayani (GIM) yang fokus pada penciptaan budaya baru di lingkungan unit kerja dan organisasi aparatur negara.



BAB II

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2024–2026

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mempunyai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 tahun. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Empat Lawang yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi baik nasional maupun internasional. Analisa terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat pentingdalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses)*, peluang (*opportunities*) dan tantangan kendala (*Threat*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi strategis instansi pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk mencapainya dalam Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja.

Sesuai dengan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rancangan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan arah kebijakan RPJPD dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 3 (tiga) tahun. Untuk mengukur keberhasilan tujuan maka ditetapkan Indikator Tujuan. Adapun indikator tujuan disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Indikator Tujuan

No	Tujuan	No	Indikator Tujuan	Ukuran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka
2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka
		3	Indeks Pembangunan Gender	Angka
		4	Tingkat Kemiskinan	%
		5	Gini Rasio	Angka
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	6	Perumbuhan Ekonomi	%
		7	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%

2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga

dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien. Keterkaitan tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.2 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	No	Sasaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
		3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
2	Meningkatkan Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		5	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah
		6	Meningkatnya Standar Hidup Layak
		7	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	8	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi
		9	Meningkatnya Pembangunan Desa
		10	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok
		11	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah
		12	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik
		13	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah
		14	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan
		15	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk mengukur keberhasilan sasaran digunakan indikator Sasaran Indikator sasaran disajikan dalam tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
		Persentase Peningkatan IPKD

		Indeks Integritas Daerah (SPI)
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE
4	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah
5	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga
6	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
		Nilai Kabupaten Sehat
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
9	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	LPE PDRB Sektor Pertanian
		LPE PDRB Sektor Perdagangan
		LPE PDRB Sektor Industri
10	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten
11	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik
		Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik
		Tingkat Konektivitas Jalan

		Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah kabupaten yang sesuai standar
12	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah
13	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat inflasi
14	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	Presentase Desa Di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tingkat Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	65,30	Nilai
		Persentase Peningkatan IPKD	0,010	Persentase
		Indeks Integritas Daerah (SPI)	68,74	Indeks

2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	4,06	Indeks
3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	2.5	Indeks
4	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	40	Persentase
5	Meningkatnya Standar Hidup Layak	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	9.970	Rupiah
6	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Daerah	Indeks Pendidikan	0,615	Indeks
7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	65,72	Angka
		Nilai Kabupaten Sehat	55	Nilai
8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,97	Indeks
9	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	LPE PDRB Sektor Pertanian	4,29	Persentase
		LPE PDRB Sektor Perdagangan	6,885	Persentase
		LPE PDRB Sektor Industri	10,20	Persentase
10	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten	7	Persentase
11	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	55,893	Persentase
		Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	67,39	Persentase
		Tingkat Konektivitas Jalan	27,2	Persentase

		Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah kabupaten yang sesuai standar	93,75	Persentase
12	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	0,80	Ratio
13	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	Tingkat inflasi	1,61	Persentase
14	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	0,6862	Indeks
15	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	Presentase Desa Di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	80	Persentase



BAB III

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025, bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan tahun Kedua periode RPD 2024-2026 karena pada tahun 2024 adalah merupakan tahun pertama RPD 2024-2026 dimulai dan di lanjutkan di tahun 2025 ini, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam menyusun LKjIP Tahun 2025 ini adalah dalam mengumpulkan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Perkembangan capaian laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Thn 2023	Realisasi Thn 2023	% Capaian Tahun 2023	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	% Capaian Thn 2024	Target Thn 2025	Realisasi Thn 2025	% Capaian Thn 2025	Target Akhir RPD 2026
Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah											
1. Nilai SAKIP	Nilai	64,10	62,87	98.08	64.20	62.91	97.99	65.30	63.96	97.95	66,40
2. Persentase Peningkatan IPKD	Persentase	Na	Na	Na	0,008	-16,01	-2,001	0.010	0.07	70	0,012
3. Indeks Integritas Daerah (SPI)	Angka	Na	66,55	Na	65,56	63,59	96,99	68.74	66.54	96.79	71,24
Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik											
1. Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	4	3,53	88,25	4,03	4,07	100,9	4.06	4.12	101.48	4,10
Sasaran 3. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi											
1. Indeks SPBE	Angka	Na	Na	Na	2,3	2,34	101	2.5	2.32	94	2,7
Sasaran 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat											
1. Angka Harapan Hidup	Tahun	65,45	65,37	99,87	65,58	70,93	108	65,72	70.93	107	65,85

2.	Nilai Kabupaten Sehat	Angka	45	Na	Na	50	58	106	55	58	103	60
		Sasaran 5. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah										
1.	Indeks pendidikan	Angka	0,603	Na	Na	0,609	13,05	21,42	0.615	0.529	86	0,62
		Sasaran 6. Meningkatnya Standar Hidup Layak										
1.	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	Rupiah	9,838	Na	Na	9,904	9,904	100	9.970	9.970	100	10,036
		Sasaran 7. Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin										
1.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	%	27,14	36	132,6	35	11	31,4	40	11.8	33	50
		Sasaran 8. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi										
1.	Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	%	80	Na	Na	80	80	100	80	100	125	100
		Sasaran 9. Meningkatnya Pembangunan Desa										
1.	Indeks Desa Membangun	%	0,6408	0,6408	100	0,6559	0,6948	105,9	0.6862	0.6984	101.78	0,6862
		Sasaran 10. Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok										
1	Tingkat Inflasi	%	1,63	Na	Na	1,62	3	54				1,60
		Sasaran 11. Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah										
1.	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	Angka	Na	Na	Na	0,60	0,60	100	0.80	0.80	100	0,90
		Sasaran 12. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik										
1.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	Na	Na	Na	55,889	26,07	46,34	55.893	45.43	81.29	55,895
2.	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	Na	Na	Na	62,39	63,53	101,83	67.39	57,33	85.07	72,39
3.	Tingkat Konektivitas Jalan	%	Na	Na	Na	25,7	24,5	95,33	27.20	24.9	91.54	28,7
4.	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar	%	Na	Na	Na	81,25	81,25	100	93.75	100	100	100
Sasaran 13. Meningkatnya Peluang Investasi Daerah												
1.	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	%	5	2,1	42	6	1,6	26,7	7	1	14.3	8

Sasaran 14. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan												
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian	%	4,15	2,05	49,39	4,22	6.63	105	4.29	6.21	144.76	4,36
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan	**%**	6,64	21,94	330,4	6,7625	1,65	0,24	6.885	7.77	112.85	7,01
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri	%	9,33	12,02	1,288	9,76	4,95	0,50	10.20	5.11	50.10	10,63
Sasaran 15. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup												
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71,04	65,19	91,7	73,13	65.63,85	90,04				76,81

Keterangan :

Warna Biru : Persentase Capaian > 100%
Warna Hijau : Persentase Capaian > 75% -100%
Warna Ungu : Persentase Capaian > 50% - 75%
Warna Coklat : Persentase Capaian ≤ 50%
- Warna Merah : Capaian tidak terealisasi (0%)
- Warna Putih : Menunggu Publish Data

B. CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi sesuai dengan misi kabupaten.

Tujuan I — **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Untuk mewujudkan Tujuan pertama telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Sasaran Strategis 1.1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPD 2024-2026 yaitu ” Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Maju dan Berdaya Saing.”**.** Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang. Adapun capaian indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

1.1.1 Nilai SAKIP

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP	Nilai	65.30	63,96	97.95

Sumber: Kemenpan RB

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang memperoleh nilai **63,96** dengan kategori **B**, dari target yang ditetapkan sebesar **65,30**.

Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target nilai SAKIP adalah sebesar **97,95%**, yang menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan.

Kategori **B** mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja telah diterapkan, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja agar dapat meningkat menjadi kategori **BB**.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

1. **Keberhasilan Capaian Kinerja**

Beberapa faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain:

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja secara berjenjang (cascading).
2. Meningkatnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja utama.

Keberhasilan tersebut memberikan kontribusi terhadap stabilitas nilai SAKIP pada kategori B dan menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan manajemen kinerja.

2. Permasalahan dan Kendala Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi dan catatan perbaikan, terdapat beberapa permasalahan utama:

1. **Analisis capaian kinerja belum komprehensif**
   Laporan kinerja masih bersifat deskriptif dan belum sepenuhnya memuat analisis mendalam terhadap faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan capaian indikator.
2. **Pemanfaatan hasil evaluasi belum optimal**
   Capaian kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar dalam perbaikan strategi dan penetapan target (target setting) periode berikutnya.
3. **Belum adanya perbandingan capaian dengan standar nasional**
   Untuk indikator yang memiliki data tingkat nasional, belum seluruhnya disajikan benchmarking terhadap capaian nasional sehingga belum menggambarkan posisi daya saing daerah secara utuh.
4. **Kualitas indikator belum sepenuhnya berbasis outcome**
   Masih terdapat indikator yang berorientasi output dan belum sepenuhnya mencerminkan dampak pembangunan.

Permasalahan tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target nilai SAKIP sebesar 65,30.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sejalan dengan pencapaian kinerja.

Analisis menunjukkan bahwa secara umum realisasi anggaran telah mendukung pencapaian indikator kinerja, namun efektivitas belanja terhadap outcome masih perlu ditingkatkan melalui:

- Penajaman perencanaan berbasis hasil,
- Rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap sasaran strategis,
- Penguatan evaluasi berbasis manfaat (value for money).

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan korelasi antara besaran anggaran dan hasil pembangunan yang dicapai.

Tindak Lanjut dan Upaya Perbaikan Menuju Kategori BB

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Kualitas Perencanaan

- Penyempurnaan cascading kinerja hingga level individu.
- Penetapan indikator yang lebih spesifik, terukur, relevan, dan berbasis outcome.
- Target setting berbasis tren historis dan benchmarking nasional.

2. Peningkatan Kualitas Analisis LKjIP

- Setiap indikator wajib dilengkapi analisis sebab-akibat.
- Penyusunan rencana aksi perbaikan yang terukur dan realistis.
- Integrasi hasil evaluasi dalam penyusunan Renja tahun berikutnya.

3. Penyajian Benchmarking Nasional

Untuk indikator yang memiliki data nasional seperti IPM, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran, akan disajikan perbandingan dengan capaian nasional guna mengetahui posisi dan kesenjangan kinerja daerah.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- Review kinerja triwulanan.
- Evaluasi lintas perangkat daerah.
- Peningkatan peran Inspektorat dalam quality assurance sistem akuntabilitas.
-

Proyeksi dan Target Peningkatan

Dengan berbagai langkah perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menargetkan:

- Peningkatan nilai SAKIP minimal menjadi ≥ 70
- Peningkatan kategori dari **B menjadi BB**

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan masyarakat.

1.1.2 Persentase Peningkatan IPKD

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 202			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan IPKD	Persentase	0,010	0.007	70%

Sumber: Balitbangda Provinsi

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan indikator yang menggambarkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pada Tahun 2025, target IPKD Kabupaten Empat Lawang ditetapkan sebesar **0,010**, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar **0,007**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja berada pada angka **70%** dari target yang ditetapkan.

Analisis Capaian

Belum tercapainya target IPKD menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih memerlukan penguatan, khususnya dalam aspek konsistensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, ketepatan waktu pelaporan, serta optimalisasi sistem pengendalian internal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian IPKD antara lain:

1. Belum sepenuhnya optimal integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

2. Kualitas penyusunan indikator kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan berbasis outcome.
3. Keterbatasan kapasitas SDM pengelola keuangan pada beberapa perangkat daerah.
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi dan rekomendasi pengawasan sebagai dasar perbaikan sistem pengelolaan keuangan.

Selain itu, dinamika regulasi dan penyesuaian kebijakan fiskal juga turut mempengaruhi konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dampak terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

IPKD memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Capaian yang belum memenuhi target dapat berdampak pada:

- Penilaian akuntabilitas keuangan daerah.
- Persepsi transparansi dan tata kelola pemerintahan.
- Kontribusi terhadap peningkatan nilai SAKIP secara keseluruhan.

Oleh karena itu, peningkatan IPKD menjadi bagian penting dalam strategi perbaikan tata kelola pemerintahan menuju peningkatan kualitas akuntabilitas.

Upaya Perbaikan ke Depan

Sebagai tindak lanjut atas capaian Tahun 2025, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan pendampingan.
3. Optimalisasi sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
4. Pemanfaatan hasil evaluasi dan audit sebagai dasar perbaikan sistem.
5. Peningkatan konsistensi antara target kinerja dan alokasi anggaran.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian IPKD pada tahun berikutnya dapat meningkat dan memenuhi target yang ditetapkan, sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mendukung peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Empat Lawang menuju kategori yang lebih tinggi.

1.1.3 Indeks Integritas Daerah (SPI)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Integritas Daerah	Angka	68,74	66,54	96,79%

Sumber: Kemenpan RB

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan instrumen pengukuran tingkat integritas instansi pemerintah yang menilai persepsi internal pegawai, pengguna layanan (eksternal), dan kalangan ahli (eksper). Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, potensi *trading in influence*, serta efektivitas sosialisasi antikorupsi.

Indikator SPI tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi menguji efektivitas sistem pencegahan korupsi dan konsistensi implementasi tata kelola di lapangan.

1. Evaluasi Capaian Tahun 2025

Target nilai SPI Tahun 2025 ditetapkan sebesar **68,74**, dengan realisasi sebesar **66,54** atau mencapai **96,79% dari target**.

Secara kuantitatif, capaian ini menunjukkan bahwa sistem integritas telah berjalan. Namun secara kualitatif, belum tercapainya target menandakan masih terdapat celah dalam efektivitas pengendalian integritas, terutama pada konsistensi implementasi di seluruh perangkat daerah.

Apabila dibandingkan dengan target Tahun 2026 sebesar 71,24, maka posisi Tahun 2025 baru mencapai 93,40% dari target jangka menengah, sehingga diperlukan akselerasi perbaikan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko.

2. Analisis Tren dan Stabilitas Sistem Integritas

Perkembangan nilai SPI Tahun 2022–2025 menunjukkan pola fluktuatif:

Tabel 3. 3 Nilai SPI 2021 – 2025

No	Tahun	Nilai SPI
1	2021	73,72
2	2022	62,74
3	2023	66,55
4	2024	63,59
5	2025	66,54

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa penguatan integritas belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh:

- Konsistensi implementasi kebijakan pengendalian internal.
- Efektivitas pengawasan berbasis risiko.
- Persepsi publik terhadap praktik pelayanan aktual.

Pola ini mengindikasikan bahwa sistem integritas belum sepenuhnya terlembagakan (institutionalized), sehingga capaian masih rentan terhadap variasi implementasi di tingkat perangkat daerah.

3. Analisis Gap terhadap Nasional (Benchmarking)

Nilai SPI Kabupaten Empat Lawang sebesar **66,54** masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar **72,32**, dengan selisih **5,78 poin**.

Gap tersebut menunjukkan bahwa:

- Standar praktik pengendalian integritas belum sepenuhnya sejajar dengan praktik terbaik nasional.
- Terdapat ruang perbaikan signifikan pada dimensi tertentu, khususnya PBJ, pengelolaan SDM, serta pengendalian potensi intervensi eksternal.

Perbandingan ini menjadi dasar dalam menetapkan strategi peningkatan berbasis *gap analysis*, bukan sekadar peningkatan administratif.

4. Analisis Akar Permasalahan Berbasis Risiko

Evaluasi internal mengidentifikasi beberapa akar permasalahan utama:

1. Budaya integritas belum terinternalisasi secara merata dan konsisten pada seluruh perangkat daerah.
2. Pengendalian risiko integritas belum sepenuhnya terintegrasi dengan manajemen kinerja dan SPIP.
3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan belum berbasis indikator risiko prioritas.
4. Terdapat kesenjangan antara regulasi formal dan praktik operasional di lapangan.
5. Dokumentasi pengendalian belum sepenuhnya mendukung pembuktian efektivitas sistem.

Dengan demikian, permasalahan utama bukan pada ketersediaan regulasi, tetapi pada kualitas implementasi, konsistensi pengawasan, dan penguatan budaya integritas.

5. Pemanfaatan Hasil SPI untuk Perbaikan Sistemik

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan bahwa hasil SPI tidak hanya menjadi laporan kinerja, tetapi menjadi dasar perbaikan manajemen risiko integritas melalui:

- Integrasi rencana aksi SPI ke dalam dokumen manajemen risiko perangkat daerah.
- Penetapan indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan dimensi SPI.
- Penyesuaian target tahun berikutnya berbasis tren historis dan analisis kesenjangan nasional.
- Prioritisasi perbaikan pada dimensi dengan skor terendah sebagai fokus intervensi.

Pendekatan ini memastikan bahwa peningkatan SPI bersifat sistemik dan terukur.

6. Strategi Akselerasi Peningkatan Nilai SPI

Untuk mendorong peningkatan nilai SPI secara signifikan dan stabil, langkah strategis yang

akan dilakukan meliputi:

1. Penguatan pengawasan berbasis risiko oleh APIP dengan fokus pada area rawan korupsi.
2. Digitalisasi dan transparansi penuh pada proses PBJ.
3. Penguatan sistem merit dan pengendalian konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM.
4. Pengawasan terhadap potensi *trading in influence* dalam pemberian izin dan rekomendasi teknis.
5. Evaluasi triwulanan rencana aksi integritas berbasis indikator kinerja.
6. Penguatan budaya antikorupsi melalui program internalisasi berkelanjutan.

Strategi ini dirancang untuk memastikan peningkatan nilai SPI tidak bersifat temporer, tetapi mencerminkan penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

Penegasan Komitmen

Capaian SPI Tahun 2025 sebesar 66,54 menunjukkan adanya progres, namun belum memenuhi target dan masih berada di bawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang berkomitmen untuk menjadikan SPI sebagai instrumen utama dalam penguatan tata kelola, pengendalian risiko, serta reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan berbasis risiko, benchmarking nasional, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan strategi, diharapkan nilai SPI pada tahun mendatang meningkat secara lebih progresif dan stabil, sekaligus mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah.

Sasaran Strategis 1.2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

1.2.1 Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Angka	4,06	4,12	101.48

Sumber: Kemenpan RB

Bahwasanya Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 yaitu 4,12 Nilai tersebut di ambil dari nilai rata – rata masing-masing OPD lokus dengan rincian nilai 3,76 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4.99 Rumah Sakit Umum Daerah, 3,80 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam hal ini nilai pelayanan publik tergantung dengan lokus itu sendiri yang di pengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan, Jika unit lokus melakukan pelayanan publik sesuai dengan standar yang di tentukan maka nilai pelayanan publik dapat meningkat namun sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan tidak sesuai atau kurang kualitasnya maka akan berpengaruh terhadap kualitas nilai yang didapatkan dengan demikian sebaiknya lokus memberikan pelayanan dengan memenuhi komponen – komponen atau item- item yang diberikan oleh kementerian PANRB baik dalam aspek pelayanan, fasilitas dan sarana prasarana yang menjadi penunjang pelayanan. Dengan demikian nilai yang di dapatkan Pemerintah kabupaten Empat Lawang mencapai target yang dibuat

sehingga dapat diertahankan dan deitingkatkan lagi kedepannya sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik llagi dari sekarang, dimana nilai Kabupaten Empat Lawang pada saat ini yaitu A- pada angka 4,07.

Analisis Capaian Nilai Pelayanan Publik Tahun 2025

Nilai Pelayanan Publik Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 tercatat sebesar **4,12** dengan kategori **A-**. Nilai tersebut merupakan hasil rata-rata dari perangkat daerah lokus penilaian, yaitu:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 3,76
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) : 4,99
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 3,80

Penilaian ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan pemenuhan komponen standar pelayanan publik yang meliputi aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Secara umum, capaian nilai 4,12 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten Empat Lawang telah berada pada **kategori sangat baik**. Kontribusi tertinggi berasal dari RSUD dengan nilai 4,99, yang mencerminkan pengelolaan layanan yang relatif lebih optimal dari sisi standar pelayanan, fasilitas, serta tata kelola pengaduan.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan pada beberapa lokus, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang nilainya berada di bawah rata-rata kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik antar perangkat daerah belum sepenuhnya merata.

Analisis Permasalahan dan Faktor Pengaruh

Perbedaan capaian antar lokus dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tingkat pemenuhan komponen standar pelayanan publik yang belum seragam.
2. Ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan.
3. Konsistensi implementasi standar operasional prosedur (SOP).
4. Pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan masyarakat yang belum optimal di beberapa unit.

Dengan demikian, nilai pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas implementasi pelayanan di masing-masing lokus. Apabila unit pelayanan melaksanakan standar pelayanan

secara konsisten sesuai pedoman yang ditetapkan, maka nilai akan meningkat. Sebaliknya, ketidaksesuaian terhadap komponen penilaian akan berdampak pada penurunan skor evaluasi.

Strategi Peningkatan dan Keberlanjutan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian nilai pelayanan publik ke depan, langkah strategis yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelarasan pemenuhan seluruh komponen penilaian pelayanan publik pada seluruh lokus.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
3. Penguatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan pelayanan prima.
4. Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi berkala.
5. Monitoring dan evaluasi internal secara periodik terhadap unit pelayanan.

Dengan strategi tersebut, diharapkan nilai pelayanan publik Kabupaten Empat Lawang tidak hanya dapat dipertahankan pada kategori A-, tetapi ditingkatkan menuju kategori A pada periode evaluasi berikutnya.

Sasaran Strategis 1.3

Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

1.3.1 Indeks SPBE

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks SPBE	Angka	2.5	2.34	94%

Sumber: Kemenpan RB

Analisis Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Empat Lawang berdasarkan hasil evaluasi terakhir Tahun 2024 (yang digunakan sebagai dasar pelaporan Tahun 2025) adalah sebesar **2,34**. Pada Tahun 2025 tidak dilakukan evaluasi nasional, melainkan hanya pemantauan dan penilaian mandiri, sehingga nilai yang digunakan masih merujuk pada hasil evaluasi sebelumnya.

Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Nilai 2,34 menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Empat Lawang berada pada kategori **cukup**, yang berarti beberapa domain tata kelola, manajemen, dan layanan digital telah berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan optimal.

Capaian tersebut diperoleh melalui komitmen dan kerja sama Bidang Aplikasi Informatika serta dukungan Kepala Dinas, Sekretariat, dan seluruh bidang pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Meskipun demikian, hasil ini masih menunjukkan adanya ruang perbaikan signifikan dalam penguatan tata kelola digital pemerintahan.

Analisis Permasalahan dan Akar Penyebab

Beberapa faktor yang menyebabkan capaian SPBE belum optimal antara lain:

1. **Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknologi informasi dan keamanan siber**, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis.
2. **Belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur keamanan informasi**, sehingga penguatan indeks keamanan informasi belum memiliki landasan kebijakan yang kuat.
3. Belum optimalnya integrasi sistem aplikasi antar perangkat daerah (belum sepenuhnya interoperable).
4. Pengelolaan manajemen risiko keamanan informasi yang belum terdokumentasi secara komprehensif.
5. Infrastruktur pendukung SPBE yang masih perlu ditingkatkan dari sisi kapasitas dan standar keamanan.

Khusus pada aspek **Indeks Keamanan Informasi Pemerintah**, belum tercapainya target kinerja disebabkan oleh belum tersusunnya Peraturan Daerah atau regulasi turunan terkait

keamanan informasi serta terbatasnya SDM bersertifikasi di bidang keamanan siber.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek teknis aplikasi, tetapi pada penguatan tata kelola, regulasi, dan kapasitas kelembagaan.

Strategi Perbaikan dan Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian SPBE dan Indeks Keamanan Informasi pada periode berikutnya, langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyusunan dan penetapan regulasi daerah terkait tata kelola dan keamanan informasi.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis, sertifikasi keamanan informasi, serta pengusulan formasi tenaga IT yang kompeten.
3. Integrasi sistem aplikasi antar perangkat daerah untuk mendukung interoperabilitas layanan.
4. Penguatan manajemen risiko keamanan informasi dan dokumentasi pengendalian internal berbasis standar nasional.
5. Evaluasi berkala terhadap capaian indikator SPBE dalam dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai SPBE secara bertahap dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang efektif, aman, dan terintegrasi.

Tujuan II

Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang

Untuk mewujudkan Tujuan kedua telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 4 (Empat) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Sasaran Strategis 2.1

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

2.1.1. Angka Harapan Hidup

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,79	70.93	108%

Sumber: BPS

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata perkiraan umur yang dapat dicapai seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada saat itu tetap konstan sepanjang hidupnya. Indikator ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kualitas pelayanan kesehatan, status gizi, lingkungan, sosial ekonomi, perilaku hidup sehat, serta angka kematian bayi dan ibu.

Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan semakin baik derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Sebaliknya, tingginya angka kematian bayi dan ibu akan berdampak pada rendahnya angka harapan hidup.

Capaian Tahun 2025

Berdasarkan RPD Kabupaten Empat Lawang, target Angka Harapan Hidup tahun 2025 ditetapkan sebesar **65,79 tahun**, sedangkan realisasinya mencapai **70,93 tahun**. Dengan demikian, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Empat Lawang mengalami peningkatan yang cukup baik. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan memiliki peluang hidup hingga usia sekitar 70 tahun.

Namun apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Sumatera Selatan sebesar **74,76 tahun**, maka AHH Kabupaten Empat Lawang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Selisih ini menunjukkan bahwa meskipun target daerah telah terlampaui, masih terdapat ruang perbaikan untuk menyamai atau melampaui capaian provinsi.

2. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Target dan Capaian Tahun 2025

Berdasarkan RPD Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025:

- **Target AKI**: 37,77 per 100.000 kelahiran hidup
- **Realisasi AKI**: 16,73 per 100.000 kelahiran hidup (1 kasus)

Capaian ini menunjukkan bahwa AKI telah melampaui target (lebih rendah dari target yang ditetapkan), yang berarti kinerja penanganan kesehatan ibu relatif baik.

- **Target AKB**: 0,57 per 1.000 kelahiran hidup
- **Realisasi AKB**: 4,68 per 1.000 kelahiran hidup (28 kasus)

Capaian AKB masih jauh dari target yang ditetapkan, sehingga menjadi perhatian serius dalam peningkatan kinerja pelayanan kesehatan.

Perbandingan dengan Provinsi

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Selatan:

- **AKI Provinsi**: 175 per 100.000 kelahiran hidup
- **AKB Provinsi**: 16,78 per 1.000 kelahiran hidup

Jika dibandingkan dengan angka tersebut, maka:

- AKI Kabupaten Empat Lawang (16,73) jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (175).
- AKB Kabupaten Empat Lawang (4,68) juga jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (16,78).

Hal ini menunjukkan bahwa secara regional, kinerja Kabupaten Empat Lawang dalam penanganan kematian ibu dan bayi tergolong baik, meskipun secara internal target AKB daerah belum tercapai.

3. Analisis Permasalahan

Beberapa faktor yang mempengaruhi masih terjadinya kematian bayi antara lain:

1. Masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun atau bukan tenaga kesehatan.
2. Rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan secara rutin.
3. Keterlambatan pengambilan keputusan rujukan.
4. Masih adanya persalinan yang dilakukan di rumah.
5. Keterbatasan tenaga kesehatan di desa, khususnya tidak adanya lagi bidan PTT.
6. Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di poskesdes.

Selain itu, meskipun persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai 83,4%, kualitas pelayanan dan sistem rujukan masih perlu diperkuat untuk mencegah kasus komplikasi yang berujung pada kematian.

4. Upaya yang Telah Dilakukan

Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pemberian PMT bagi balita dan ibu hamil.
- Distribusi tablet tambah darah (Fe) bagi ibu hamil.
- Penyediaan rumah tunggu kelahiran.
- Pelatihan bagi bidan (meskipun belum merata).
- Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Namun demikian, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran untuk pelatihan kegawatdaruratan neonatal serta keterbatasan SDM kesehatan di desa.

5. Implikasi terhadap Perbaikan Kinerja

Secara umum, capaian AHH, AKI, dan AKB menunjukkan bahwa program kesehatan dasar telah berjalan dengan baik, terutama dalam penanganan kematian ibu. Akan tetapi, untuk meningkatkan angka harapan hidup agar mendekati rata-rata provinsi, diperlukan penguatan pada:

- Intervensi promotif dan preventif,
- Peningkatan kualitas layanan primer,
- Pemerataan tenaga kesehatan,
- Penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal,
- Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pemeriksaan kehamilan.

Analisis perbandingan dengan provinsi ini menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas pelaporan kinerja, karena tidak hanya menyajikan capaian angka, tetapi juga memberikan gambaran posisi daerah secara regional sebagai dasar perbaikan strategi dan penetapan target pada periode berikutnya.

2.1.2. Nilai Kabupaten Sehat

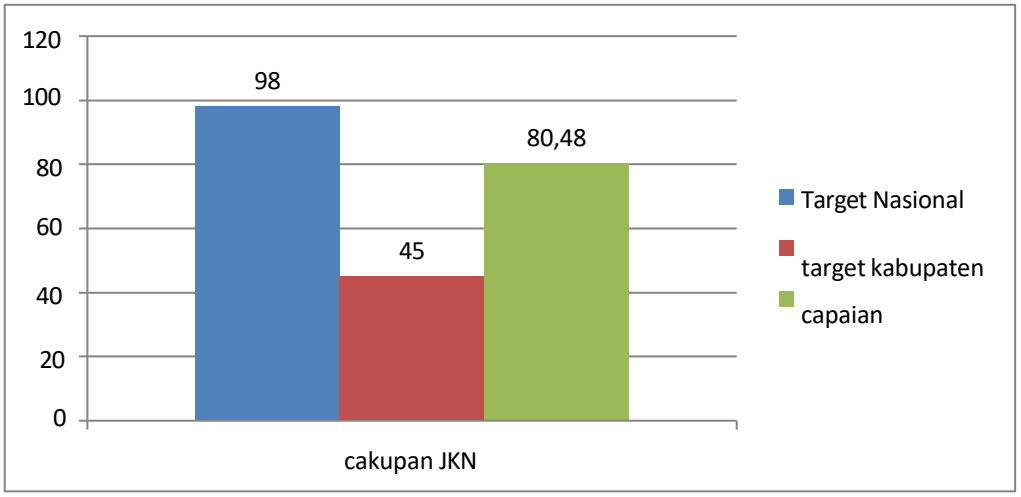
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Nilai Kabupaten Sehat	Angka	50	58	106%

Sumber: Dinkes Provinsi

Salah satu indikator dari Nilai Kabupaten Sehat adalah Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan Nasional merupakan integrasi dari berbagai bentuk jaminan kesehatan yang telah diterapkan sebelumnya. Universal *Health Coverage* (UHC) merupakan salah satu cita-cita Indonesia yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan. Selain itu UHC, merupakan program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Grafik 3. 4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang



Kepesertaan JKN Kabupaten Empat Lawang tahun 2025 sudah mencapai 80,48% artinya masih tersisa 19,52% lagi penduduk yang belum tercover JKN. Dan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) harus adanya upaya yang dilakukan pemerintah supaya masyarakat yang belum menjadi peserta JKN dapat tercover sebagai peserta JKN, misalnya menjadikan JKN seperti kebutuhan layaknya orang yang mempunyai KTP. Jadi bila JKN sudah dijadikan kebutuhan maka JKN akan menjadi syarat seseorang dalam membuat berbagai dokumen seperti pentingnya KTP bagi seseorang. Dan perlunya mengharuskan perusahaan-perusahaan yang ada untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN. Berikut ini cakupan Jaminan Kesehatan menurut jenis jaminan tahun 2025.

Tabel 3. 6 Cakupan Jaminan Kesehatan Tahun 2025 Kabupaten Empat Lawang

NO	JENIS KEPESERTAAN	JUMLAH JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
1	2	3	4
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	137.046	40,05
2	PBI APBD	82.599	24,14
SUB JUMLAH PBI		219.645	64,19
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	31.387	9,17
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri	22.540	6,59
3	Bukan Pekerja	1.812	0,53
SUB JUMLAH NON PBI		55.739	16,29
JUMLAH (KAB/KOTA)		275.384	80,48

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan peserta PBI atau yang peserta JKN yang ditanggung oleh pemerintah sudah 64,90%. Sejauh ini pemerintah telah berupaya untuk membayarkan iuran bagi fakir miskin dan tidak mampu sebagai upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk golongan ini. Diharapkan bagi masyarakat yang kurang mampu yang belum tercover menjadi peserta JKN dapat segera mendapat bantuan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dananya disediakan oleh pemerintah. Tersedianya data BDT dan rekomendasi dari Dinas Sosial selama ini cukup membatu dalam pendaftaran peserta JKN kurang mampu.

Kendala yang dihadapi di lapangan dalam pendaftaran peserta JKN biasanya saat entri data beberapa data kependudukan (NIK peserta) tidak online/tidak sinkron dengan data pencatatan sipil. Dan masih banyak peserta yang didaftarkan tidak sesuai antara alamatnya dengan alamat pada kartu JKN yang di cetak sehingga kartu tersebut tidak dapat digunakan. Selain itu juga masih ditemukan data ganda.

Pada tahun 2025 berdasarkan data yang didapat bahwa di Kabupaten Empat Lawang masih kekurangan tenaga PNS dokter gigi 6 orang. Dan masih ada kekurangan beberapa tenaga kesehatan lain. Implementasi JKN juga harus diimbangi dengan pemerataan SDM Kesehatan karena dengan hal itu diharapkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Kesesuaian antara kebutuhan layanan kesehatan penduduk dengan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, termotivasi sesuai

tujuan, terlatih merupakan dasar mempercepat pencapaian UHC.

Sasaran Strategis 2.2

Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah

2.2.1. Indeks Pendidikan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pendidikan	Angka	0,615	0.529	86.02%

Sumber: BPS

Indeks Pendidikan merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana metodologi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks ini dihitung berdasarkan dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Berdasarkan data yang tersedia, nilai Harapan Lama Sekolah tercatat sebesar **11,23 tahun**, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah sebesar **6,50 tahun**. Setelah dilakukan proses normalisasi sesuai standar penghitungan IPM, diperoleh Indeks Pendidikan sebesar **0,529** atau setara dengan **52,9 persen**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih berada pada kategori menengah dan memerlukan upaya peningkatan, khususnya dalam mendorong rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas serta memperluas akses pendidikan bagi anak usia sekolah. Penguatan program wajib belajar, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta pengurangan angka putus sekolah menjadi langkah strategis yang perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan capaian Indeks Pendidikan pada periode berikutnya.

Adapun penjelasan 2 indikator Indeks pendidikan Sebagai Berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Penanggung jawab
			TAHUN 2024			TAHUN 2025			
Sasaran 11. Meningkatnya kualitas Masyarakat yang melanjutkan pendidikan									
1	Harapan lama sekolah	%	12,44	10,23	82,23	12,54	11,23	89,55	Disdikbud
Sasaran 16. Meningkatnya partisipasi Masyarakat untuk sekolah									
1	Rata-rata Lama sekolah	%	7,77	5,64	72,58	7,78	6,50	83,55	Disdikbud

Sasaran "Meningkatnya kualitas masyarakat yang melanjutkan Pendidikan".

Pada indikator yang ada di atas sudah menunjukan tingkat keberhasilan baik di indikator Harapan lama sekolah.

Pada tahun 2024, dinas pendidikan dan kebudayaan belum bisa membandingkan capaian indikator karena pada tahun 2024 ada perubahan RPJMD, jadi indikator yang ada berubah dari tahun sebelumya dan hanya bisa menampilkan target dan realisasi pada tahun 2024 saja.

Sasaran " Meningkatnya partisipasi Masyarakat untuk sekolah".

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran ini adalah profesionalisme Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai Bidang Pekerjaannya Pengukuran target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator pertama pada sasaran ini adalah Rata-rata lama sekolah. Dari hasil evaluasi terhadap indikator ini ternyata capaian Ini menunjukan bahwa target Rata-rata lama sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sepenuhnya dapat tercapai **sangat berhasil.**

Pada keberhasilan persentase ini di dukung oleh PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal / kesetaraan.* PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM, *penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal/ kesetaraan.* PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, *pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, paud, dan pendidikan nonformal/ atau kesetaraan.* PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN *Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota* .

Kendala yang dihadapi pada pemenuhan, Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama Sekolah Masih kurang meratanya sekolah yang dibangun, dan kurangnya pengawasan dan perawatan rutin. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dunia pendidikan maka sering sekali terdapat anak yang putus sekolah, adanya perubahan kurikulum dan beberapa sekolah masih belum ada jaringan internet. Untuk meningkatkan indikator Persentase Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah pada tahun berikutnya maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan Pemerataan pada pembangunan sekolah di kabupaten empat lawang, dan melakukan pengawasan dan perawatan rutin dan melakukan sosalisasi kepada pihak sekolah, orang tua dan masyaraakat akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Indikator pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
			2024			2025		
1	Meningkatnya kualitas masyarakat yang melanjutkan pendidikan	Harapan lama sekolah	12,44	10,23	82,23%	12,54	11,23	89,55%
2	Meningkatnya partisipasi Masyarakat untuk sekolah	Rata-rata lama Sekolah	7,77	5,64	72,58%	7,78	6,50	83,55%
3	Meningkatnya akurasi data kebudayaan daerah	Persentase kebudayaan daerah yang diinvetarisir	40%	20%	50%	50%	30%	60%
4	Meningkatkan potensi pengembangan budaya daerah	Persentase kebudayaan daerah yang dikembangkan	40%	20%	50%	45%	25%	55,55%
5	Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase kebudayaan daerah yang dikelola	30%	10%	33,33%	40%	15%	37,5%

Hambatan pencapaian indikator diatas pada tahun 2025 yaitu, pada Meningkatnya Kualitas masyarakat yang melanjutkan pendidikan, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pendidian anak usia dini masih dianggap kurang penting. Pada Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk sekolah kendala yang muncul pada indikator ini yaitu masih banyak guru yang belum terpanggil untuk mengikuti sertifikasi karna menunggu pemanggilan dari LPMP.

Sasaran Strategis 2.3

Meningkatnya Standar Hidup Layak

2.3.1. Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	Rupiah	9,970	9,970	100%

Sumber: BPS

Sasaran: Meningkatnya Standar Hidup Layak

Dalam rangka mewujudkan peningkatan Standar Hidup Layak (SHL) masyarakat, indikator yang digunakan adalah **Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga** sebagai refleksi kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Tahun 2025, realisasi pengeluaran per kapita rumah tangga Kabupaten Empat Lawang mencapai **Rp 9.970 ribu per tahun** (atau sesuai satuan yang digunakan dalam dokumen perencanaan), dengan capaian kinerja **100%** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara nominal indikator telah memenuhi target perencanaan.

Analisis Perbandingan Regional

Mengacu pada data Kementerian Ketenagakerjaan, Standar Hidup Layak (SHL) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 berada pada kisaran **± Rp3.300.000 per bulan**. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Empat Lawang Tahun 2025 masih mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan sebesar **Rp3.681.571,-**.

Secara normatif, nilai upah minimum tersebut telah berada di atas standar hidup layak provinsi. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tidak seluruh masyarakat merupakan pekerja formal penerima upah minimum, sehingga tingkat kesejahteraan riil masih dipengaruhi oleh struktur

pekerjaan masyarakat yang didominasi sektor informal dan pertanian.

Dengan demikian, meskipun indikator pengeluaran per kapita telah mencapai target, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan standar hidup layak masih perlu mendapat perhatian.

Faktor yang Mempengaruhi Standar Hidup Layak

Beberapa komponen kebutuhan dasar yang memengaruhi standar hidup layak masyarakat antara lain:

- **Kebutuhan pangan**, meliputi kecukupan kalori dan protein.
- **Perumahan**, termasuk biaya tempat tinggal dan utilitas (listrik, air, gas).
- **Pendidikan**, mencakup biaya sekolah dan perlengkapan belajar.
- **Kesehatan**, termasuk biaya pengobatan dan jaminan kesehatan.
- **Sandang**, berupa kebutuhan pakaian.
- **Transportasi**, baik umum maupun pribadi.
- **Komunikasi dan informasi**, seperti telepon dan internet.
- **Hiburan/rekreasi**, sebagai bagian dari kualitas hidup.

Selain itu, faktor eksternal seperti inflasi daerah, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Analisis Permasalahan

Meskipun capaian indikator mencapai 100%, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat.
2. Tingginya ketergantungan pada sektor informal dan pertanian.
3. Fluktuasi harga komoditas kebutuhan pokok.
4. Dampak inflasi terhadap daya beli riil masyarakat.
5. Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator secara kuantitatif perlu diiringi dengan analisis kualitatif terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat.

Upaya dan Solusi yang Dilaksanakan

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan standar hidup layak masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program intervensi, antara lain:

- Subsidi BBM dan energi.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT).
- Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- Bantuan sosial lainnya.

Program-program tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan di Kabupaten Empat Lawang.

Arah Kebijakan ke Depan

Untuk memastikan peningkatan standar hidup layak yang berkelanjutan, langkah strategis yang perlu diperkuat meliputi:

- Pengembangan sektor ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
- Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja.
- Pengendalian inflasi daerah melalui stabilisasi harga.
- Penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
- Monitoring berkala terhadap perkembangan daya beli masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan standar hidup layak tidak hanya tercermin pada capaian angka indikator, tetapi juga berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Sasaran Strategis 2.4

Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin

2.4.1. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	%	35	11,8	33,71

Sumber: BPS

Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan pendampingan dan intervensi dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2025 tercatat sebanyak **28.420 jiwa**, menurun dibandingkan Tahun 2024 yang berjumlah **30.780 jiwa**. Secara persentase, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari **11,80% pada Tahun 2024 menjadi 10,80% pada Tahun 2025**.

Penurunan ini menunjukkan tren yang konsisten dan menjadi indikasi bahwa program intervensi sosial yang dilaksanakan memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan beban masyarakat miskin.

Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. **Pemberian Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas**
   Bantuan diberikan kepada masyarakat disabilitas yang telah terdata dan mengajukan proposal permohonan bantuan. Proposal yang masuk direkap oleh Bidang Rehabilitasi Sosial untuk kemudian dianggarkan pada tahun berikutnya. Selain bersumber dari APBD, bantuan juga diperoleh melalui dana APBN melalui Sentra Budi Perkasa Kementerian Sosial.
   Kendala yang sering terjadi adalah masih adanya masyarakat yang membutuhkan namun belum terdata atau tidak mengajukan proposal, serta keterlambatan proses realisasi pengadaan alat bantu.

Gambar 3. 1 Pemberian Bantuan Alat Bantu Kepada Disabilitas





2. **Pemberian Bantuan Permakanan bagi Lansia, Anak Kurang Mampu dan Disabilitas**

   Pada Tahun 2025, kegiatan penyediaan permakanan melalui APBD tidak dapat dilaksanakan karena tidak terealisasinya anggaran. Penyaluran bantuan hanya bersumber dari APBN melalui Sentra Budi Perkasa Palembang. Kondisi ini menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan sosial.

Gambar 3. 2 Pemberian Bantuan makanan pada Lansia dan anak kurang mampu dan Disabilitas





3. **Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif**

   Program ini bertujuan mendorong masyarakat kurang mampu untuk memulai usaha produktif dan menciptakan UMKM baru sebagai upaya peningkatan pendapatan. Namun realisasi bantuan masih terkendala keterbatasan anggaran APBD, sehingga sebagian besar bantuan bersumber dari APBN dan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 3. 3 Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Kreatif





4. **Pemberian Bantuan Pasca Bencana**

   Bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak kebakaran, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta dilaksanakan oleh TAGANA di wilayah terdampak. Kendala yang sering dihadapi adalah validitas dan kecepatan pendataan korban terdampak.

Gambar 3. 4 Pemberian Bantuan Pasca Bencana



Realisasi Anggaran dan Tantangan

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Empat Lawang tercatat sebesar **55,87%–65,14%** (sesuai laporan program), dari total 5 program yang dilaksanakan. Rendahnya realisasi anggaran ini berdampak pada tertundanya beberapa kegiatan bantuan, sehingga sebagian penerima manfaat harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain:

- Pemangkasan dan keterbatasan anggaran daerah.
- Tidak terealisasinya sebagian anggaran APBD.
- Ketergantungan pada sumber pendanaan APBN.
- Permasalahan validitas dan pemutakhiran data masyarakat miskin.
- Kurangnya koordinasi dan konsistensi pelaporan dari pendamping PKH, TKSK, dan perangkat desa.

Analisis dan Implikasi Kinerja

Meskipun terjadi keterbatasan anggaran, tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa intervensi sosial tetap memberikan dampak positif. Namun demikian, rendahnya realisasi anggaran menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek perencanaan, penganggaran, dan eksekusi program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, ketergantungan pada bantuan APBN menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat untuk menjamin keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

Upaya Perbaikan ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penguatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala.
2. Peningkatan koordinasi antara pendamping PKH, TKSK, dan perangkat desa.
3. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan riil masyarakat.
4. Peningkatan alokasi anggaran pada program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.
5. Penguatan program pemberdayaan ekonomi produktif agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan sosial semata.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Empat Lawang dapat terus berlanjut secara berkelanjutan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan III

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup

Untuk mewujudkan Tujuan ketiga telah ditetapkan 8 (Delapan) sasaran strategis. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan upaya pencapaian 8 (Delapan) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

Sasaran Strategis 3.1

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.1.1. Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	%	80	100	125%

Sumber: Laporan IDM dari Kemendesa

Sasaran: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat eks transmigrasi merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam mendorong pemerataan pembangunan wilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pada kawasan transmigrasi.

Pada Tahun 2025, target indikator kinerja ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi mencapai **100%**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **125% dari target tahunan**. Dengan demikian, target akhir RPD Tahun 2026 sebesar **100% telah terpenuhi lebih awal**.

Berdasarkan data wilayah eks transmigrasi Kabupaten Empat Lawang, seluruh desa eks transmigrasi yang berjumlah 5 (lima) desa telah masuk dalam kategori **Desa Berkembang**. Adapun desa-desa tersebut adalah:

1. Desa Mekar Jaya
2. Desa Mekarti Jaya
3. Desa Tanjung Ning Jaya
4. Desa Lubuk Puding
5. Desa Pancur Mas

Capaian ini menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur desa. Indikator kesejahteraan ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, membaiknya ketersediaan fasilitas dasar desa, serta meningkatnya partisipasi sosial kemasyarakatan.

Analisis Capaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator 100% menunjukkan bahwa intervensi program pembinaan kawasan transmigrasi berjalan efektif. Percepatan pencapaian target RPD 2026 juga mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berada pada jalur yang tepat.

Namun demikian, capaian indikator desa berkembang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan yang ideal. Status desa berkembang masih memerlukan peningkatan menuju kategori Desa Maju atau Mandiri agar dampak kesejahteraan lebih berkelanjutan dan merata.

Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun indikator telah tercapai, terdapat beberapa kendala di lapangan, antara lain:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat eks transmigrasi yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penguasaan keterampilan dan kewirausahaan.

- Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur jalan menuju serta di dalam kawasan eks transmigrasi yang belum sepenuhnya optimal.
- Terbatasnya akses terhadap permodalan dan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.
- Masih terbatasnya diversifikasi usaha yang berbasis potensi lokal.

Upaya dan Strategi Ke Depan

Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat eks transmigrasi, diperlukan langkah strategis melalui:

- Pelatihan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan lokal.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- Pembangunan serta peningkatan sarana dan prasarana desa, khususnya akses jalan dan fasilitas ekonomi.
- Penguatan akses permodalan dan kemitraan usaha produktif.
- Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan strategi tersebut, diharapkan desa-desa eks transmigrasi di Kabupaten Empat Lawang tidak hanya bertahan pada status Desa Berkembang, tetapi mampu meningkat menjadi Desa Maju dan Mandiri, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3.2

Meningkatnya Pembangunan Desa

3.2.1 Indeks Desa Membangun

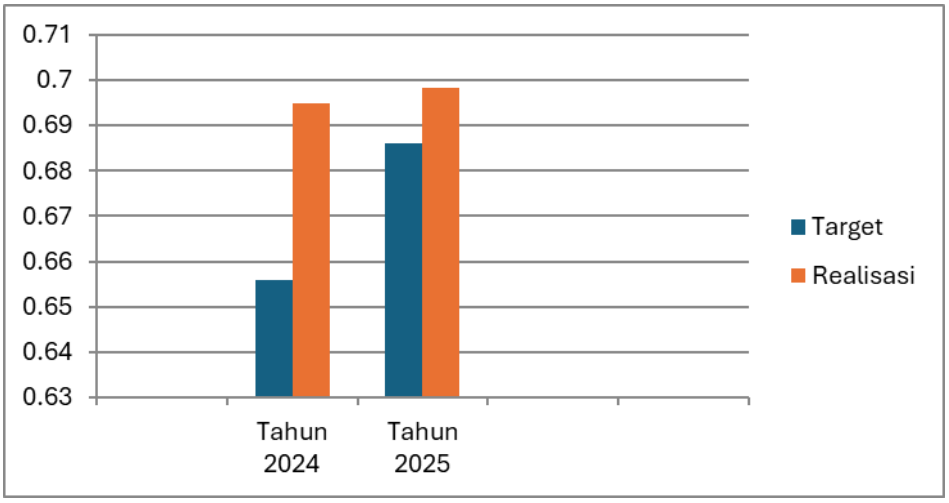
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6862	0,6984	101,78

Sumber: Laporan IDM dari Kemendesa

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indikator Indeks Desa Membangun dikaitkan dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Pencapaian indikator tersebut dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 3. 5 Nilai Indeks Desa Membangun 2024-2025



Dari table dan grafik diatas dapat terlihat pencapaian indikator kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) sangat stabil dari Tahun 2024 yaitu 0.6948 dan Tahun 2025 sebesar 0.6984 melebihi target yaitu 0.6862, maka dapat disimpulkan Indeks Desa Membangun dengan tahun 2025 sebesar 101% dari target. Ini bisa diartikan bahwasanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 mencapai keberhasilan dalam meningkatkan angka IDM pada Kabupaten Empat Lawang telah mencapai target yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama OPD.

Tabel 3. 8 Jumlah Desa Berdasarkan Status di Empat Lawang

No	Kecamatan	Jumlah Desa pada Tahun 2024 berdasarkan status					Jumlah Desa
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
1	Muara Pinang	0	0	9	11	2	22
2	Pendopo	0	0	1	14	1	16
3	Ulu Musi	0	0	13	0	1	14
4	Tebing Tinggi	0	0	11	8	0	20
5	Lintang Kanan	0	0	11	5	0	16
6	Talang Padang	0	0	13	0	0	13
7	Pasemah Air Keruh	0	0	11	4	1	15
8	Sikap Dalam	0	0	11	0	0	11
9	Saling	0	0	4	6	0	10
10	Pendopo Barat	0	0	10	0	0	10
Jumlah		**0**	**0**	**94**	**48**	**5**	**147**

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025, kondisi status desa di Kabupaten Empat Lawang menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Dari total desa yang ada, tidak terdapat lagi desa berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal. Adapun klasifikasi status desa adalah sebagai berikut:

- Desa Sangat Tertinggal : 0 Desa
- Desa Tertinggal : 0 Desa
- Desa Berkembang : 94 Desa
- Desa Maju : 48 Desa
- Desa Mandiri : 5 Desa

Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pembangunan desa di Kabupaten Empat Lawang telah bergerak ke arah yang lebih baik, ditandai dengan tidak adanya desa tertinggal. Namun demikian, mayoritas desa masih berada pada kategori Desa Berkembang, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk mendorong peningkatan status menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Empat Lawang menghadapi beberapa kendala utama, yaitu:

1. Lembaga ekonomi desa belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Penggunaan teknologi tepat guna dalam mendukung perekonomian desa masih belum optimal.
3. Partisipasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, serta masyarakat hukum adat dalam pemberdayaan desa masih relatif rendah.

Kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya kemandirian ekonomi desa dan terbatasnya inovasi dalam pengembangan potensi lokal.

Langkah Strategis yang Dilaksanakan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, DPMD Kabupaten Empat Lawang mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan melalui inovasi berbasis sumber daya lokal guna menciptakan produk unggulan yang berdaya saing.
2. Mendorong kreativitas dan inovasi usaha skala rumahan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, termasuk dalam penyusunan anggaran desa.
4. Membentuk dan mengoptimalkan lembaga ekonomi desa dengan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku utama usaha.
5. Mendorong penciptaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung kemajuan desa.

Program Pendukung Peningkatan IDM

Sebagai penjabaran dari strategi tersebut, DPMD Kabupaten Empat Lawang menyusun program kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan status desa, khususnya desa yang masih berada pada kategori Berkembang. Program tersebut meliputi:

1. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**

2. **Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa**
3. **Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**

Melalui program-program tersebut, diharapkan desa dapat meningkatkan ketahanan ekonomi, kualitas tata kelola pemerintahan, serta partisipasi sosial masyarakat.

Kebijakan Tahun 2025

Mengacu pada perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 terhadap tahun 2024, DPMD Kabupaten Empat Lawang akan terus memperkuat upaya pencapaian target IDM melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Desa secara efektif dan efisien sesuai prioritas pembangunan dengan dukungan regulasi yang jelas dan terukur.
2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan Dana Desa.
3. Memberikan pembinaan intensif kepada desa berstatus Berkembang, baik dalam penguatan ekonomi desa maupun peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Dengan langkah tersebut, diharapkan peningkatan status desa dapat berjalan lebih progresif, sehingga jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri terus bertambah, serta terwujud kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Empat Lawang secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3.3

3.3.1. Tingkat Inflasi

Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Inflasi	Persentase	1.62	3	1,85

Sumber: BPS

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli uang menurun, karena dengan jumlah uang yang sama, seseorang dapat membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Inflasi biasanya diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang mencatat perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat.

Kabupaten Empat Lawang tidak termasuk dalam wilayah yang menjadi acuan penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Di Provinsi Sumatera Selatan, pengukuran inflasi dilakukan di beberapa kota, seperti Palembang, Lubuklinggau, dan Muara Enim. Sebagai contoh, pada April 2024, Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi year on year sebesar 3,12 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,39.

Meskipun tidak menjadi kota acuan inflasi, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang tetap berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif. Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk menjaga pasokan komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, sehingga dapat menekan angka inflasi di kedua daerah tersebut. Dan mengadakan Gerakan Pasar Murah untuk Menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara rutin melakukan pemantauan ketersediaan pangan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat berdampak negatif pada perekonomian lokal. dengan berbagai upaya tersebut, Kabupaten Empat Lawang berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif.

Sasaran Strategis 3.4

Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah

3.4.1. Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	Ratio	0.80	0,80	100%

Sumber: DISHUB

Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah

Sasaran “Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah” diukur melalui indikator **Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah**. Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar **0,80** dan terealisasi sebesar **0,80**, sehingga capaian kinerja mencapai **100%**. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan jaringan transportasi antar wilayah di Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar **0,60**, maka pada Tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar **0,20 poin** atau mencapai **target tahun 2025 0.80**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam konektivitas transportasi wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Penanggung Jawab
1	Rasio Konektivitas Transportasi Wilayah	Angka	0,60	0,80	Dinas Perhubungan

Faktor Pendukung Capaian

Tercapainya target indikator ini didukung oleh beberapa program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan, antara lain:

1. Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan.

Selain itu, peningkatan rasio konektivitas juga didukung oleh pelaksanaan survei menyeluruh dan pendataan inventarisasi trayek angkutan di seluruh wilayah Kabupaten Empat Lawang. Penyusunan basis data trayek yang akurat menjadi landasan teknis dalam perencanaan pengembangan sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi.

Dengan tersedianya data tersebut, Pemerintah Daerah memiliki dasar yang kuat dalam melakukan pemetaan kebutuhan mobilitas masyarakat. Hal ini akan sangat mendukung optimalisasi operasional terminal setelah pembangunan dan renovasi selesai, sehingga integrasi trayek dan pengaturan jalur dapat diterapkan secara lebih efektif dan efisien.

Hambatan dan Tantangan

Meskipun target telah tercapai, terdapat beberapa tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan capaian kinerja, antara lain:

- Kondisi topografi wilayah Kabupaten Empat Lawang yang didominasi perbukitan, sehingga menyulitkan pengembangan jaringan transportasi.
- Risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat mengganggu aksesibilitas antar wilayah.
- Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur transportasi secara berkelanjutan.

Analisis Kinerja dan Arah Perbaikan

Meskipun capaian indikator telah mencapai 100%, evaluasi kinerja tetap diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan rasio konektivitas benar-benar berdampak pada kemudahan akses masyarakat, penurunan biaya transportasi, serta peningkatan aktivitas ekonomi antar wilayah.

Ke depan, strategi yang perlu diperkuat antara lain:

- Pengembangan sistem transportasi berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
- Integrasi konektivitas transportasi dengan pusat pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana.
- Monitoring berkala terhadap efektivitas jalur dan trayek angkutan.

Dengan langkah tersebut, capaian indikator tidak hanya berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi benar-benar mencerminkan peningkatan kualitas layanan transportasi dan mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3.5

Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik

3.5.1. Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persentase	55.893	45.43	81.29

Sumber: PUPR

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Pada Tahun 2025, capaian pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan di Kabupaten Empat Lawang mencapai **81,29%**. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang

signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar **46,65%**, atau mengalami kenaikan sebesar **34,64 poin persentase**.

Tabel Realisasi tahun 2024 dan 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1: Meningkatnya Akses/Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	55,889	26,07	46,65	55,893	45,43	81,29

Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam distribusi hasil pertanian dan aktivitas perdagangan.

Kemajuan tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya guna menjamin kualitas pelayanan publik yang optimal di bidang infrastruktur dasar

Permasalahan / Kendala yang Dihadapi

Meskipun capaian mengalami peningkatan signifikan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. **Keterbatasan anggaran**, khususnya dalam pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan serta jembatan yang memerlukan biaya besar dan berkelanjutan.
2. **Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten**, terutama dalam bidang perencanaan teknis, pengawasan, serta pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.
3. Kebutuhan pemeliharaan rutin yang cukup tinggi akibat kondisi geografis dan faktor cuaca yang memengaruhi ketahanan infrastruktur.

Strategi Mengatasi Permasalahan

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan beberapa strategi, yaitu:

1. **Optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD**, termasuk memanfaatkan dukungan APBN maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat lebih maksimal.

2. **Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan**, termasuk penguatan sistem pengawasan dan manajemen proyek.
3. **Peningkatan kompetensi SDM**, melalui pendidikan, pelatihan teknis, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang infrastruktur, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pekerjaan.

Analisis Kinerja

Kenaikan capaian dari 46,65% menjadi 81,29% menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang cukup signifikan dalam sektor infrastruktur. Namun demikian, keberlanjutan pembangunan harus diimbangi dengan perencanaan pemeliharaan yang berkelanjutan agar kualitas jalan dan jembatan tetap terjaga dalam jangka panjang.

Penguatan kapasitas fiskal daerah serta peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada kuantitas capaian, tetapi juga pada kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas.

3.5.2. Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase	67,39	57.33	85.07

Sumber: PUPR

Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2025, indikator **Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik yang Dilayani Jaringan Irigasi** ditargetkan sebesar **67,39%**, dengan realisasi sebesar **57,33%**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **85,07%** dari target yang ditetapkan.

Tabel Perbandingan Realisasi tahun 2024 dan 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1: Meningkatnya Akses/Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	62,39	63,53	101,83	67,39	57,33	85,07

Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang mencapai 101,83%, kinerja Tahun 2025 mengalami penurunan. Namun demikian, penurunan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dalam pelayanan kepada masyarakat, melainkan adanya kendala dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), khususnya pada subkegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Secara substantif, jaringan irigasi memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas sektor pertanian, menjaga ketahanan pangan daerah, serta menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di Kabupaten Empat Lawang. Oleh karena itu, meskipun realisasi belum mencapai target, program pemeliharaan dan rehabilitasi tetap menjadi prioritas pembangunan daerah

Permasalahan / Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator ini antara lain:

- **Keterbatasan anggaran**, sehingga tidak seluruh jaringan irigasi dengan kondisi rusak ringan maupun rusak berat dapat tertangani secara optimal. Pemeliharaan dan rehabilitasi belum sepenuhnya maksimal karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
- **Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten**, khususnya dalam bidang perencanaan teknis, pengawasan lapangan, serta pengendalian mutu pekerjaan konstruksi jaringan irigasi.
- **Tingginya kebutuhan rehabilitasi** akibat faktor usia infrastruktur dan kondisi alam.

Strategi Mengatasi Permasalahan

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan beberapa strategi, yaitu:

- **Optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD**, termasuk dukungan APBN maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, guna memperluas cakupan penanganan jaringan irigasi.
- **Peningkatan sarana dan prasarana pendukung**, termasuk penguatan sistem pengawasan dan manajemen pengelolaan jaringan irigasi.
- **Peningkatan kompetensi SDM**, melalui pendidikan, pelatihan teknis, serta Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang infrastruktur dan sumber daya air untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian mutu pekerjaan.

Analisis Kinerja

Meskipun capaian Tahun 2025 belum memenuhi target, realisasi sebesar 85,07% masih menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam kondisi keterbatasan anggaran. Penurunan dibandingkan Tahun 2024 menjadi bahan evaluasi penting dalam memperkuat perencanaan program, khususnya dalam penentuan prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan dan luas layanan terhadap lahan pertanian produktif.

Ke depan, pengelolaan jaringan irigasi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil petani, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan infrastruktur, efisiensi penggunaan air, serta sinergi lintas sektor. Dengan demikian, fungsi irigasi sebagai pendukung utama sektor pertanian dan penopang perekonomian Kabupaten Empat Lawang dapat terus terjaga dan meningkat secara berkelanjutan.

3.5.3. Tingkat Konektivitas Jalan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2024			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tingkat Konektivitas Jalan	Persentase	27.20	24,9	91.54

Sumber: PUPR

Pembukaan Ruas Jalan

Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah melaksanakan pembukaan **4 (empat) ruas jalan baru**, yaitu:

1. Ruas Jalan Sugiwaras
2. Ruas Jalan Peraduan Ijut
3. Ruas Jalan Talang Gunung
4. Ruas Jalan Pancur Mas

Dengan penambahan tersebut, total ruas jalan yang telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Bidang Bina Marga menjadi sebanyak **249 SK ruas jalan**.

Penambahan ruas jalan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses kawasan produktif, serta mendorong pemerataan

pembangunan. Konektivitas jalan yang semakin baik berdampak langsung pada kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta penguatan aktivitas ekonomi di wilayah pedesaan.

Tabel Perbandingan Realisasi tahun 2024 dan 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1: Meningkatnya Akses/Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Tingkat Konektivitas Jalan	%	25,7	24,5	95,33	27,20	24,9	91,54

Meskipun demikian, capaian ini masih perlu terus ditingkatkan guna menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur yang semakin berkembang setiap tahunnya.

Permasalahan / Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan ruas jalan, terdapat beberapa kendala, antara lain:

- **Keterbatasan anggaran**, khususnya untuk pembangunan lanjutan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan serta jembatan agar tetap dalam kondisi mantap.
- **Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten**, terutama dalam bidang perencanaan teknis, pengawasan lapangan, dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.
- Tingginya kebutuhan pemeliharaan akibat kondisi geografis dan faktor cuaca yang memengaruhi ketahanan jalan.

Strategi Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- **Optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD**, termasuk dukungan APBN dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur.
- **Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan**, termasuk penguatan sistem manajemen proyek dan pengawasan teknis.

- **Peningkatan kompetensi SDM**, melalui pendidikan, pelatihan, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) di bidang infrastruktur untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu pekerjaan.

Analisis Kinerja

Penambahan 4 ruas jalan baru pada Tahun 2025 menunjukkan adanya progres nyata dalam upaya peningkatan konektivitas wilayah. Total 249 ruas jalan yang telah memiliki SK menjadi dasar hukum dan administrasi yang kuat dalam pengelolaan jaringan jalan kabupaten.

Ke depan, fokus pembangunan tidak hanya pada penambahan ruas baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan kemantapan jalan yang telah ada, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.5.4. Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar	Persentase	93.75	100	106.7

Sumber: PUPR

Persentase Bangunan Gedung dan Arsitektur Prasarana Pemerintah yang Sesuai Standar

Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Arsitektur Prasarana Pemerintah dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten yang Sesuai Standar merupakan ukuran kinerja dalam memastikan bahwa bangunan gedung pemerintah yang dibangun atau ditangani telah memenuhi standar teknis, fungsi, keselamatan, dan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator ini mendukung **Tujuan: Meningkatnya Akses/Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik**.

Tabel Perbandingan Realisasi tahun 2024 dan 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tujuan 1: Meningkatnya Akses/Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang sesuai Standar	%	81,25	81,25	100	93,75	100	106,7

Pada Tahun 2025, jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun dan ditangani sebanyak **3 (tiga) gedung**, dengan realisasi indikator mencapai **100%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,75%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **106,7%**, yang menunjukkan kinerja sangat baik.

Selain itu, capaian Tahun 2025 telah memenuhi target akhir RPD sebesar **100%**, sehingga indikator ini telah mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Pada Tahun 2025, jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun dan ditangani sebanyak **3 (tiga) gedung**, dengan realisasi indikator mencapai **100%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 93,75%. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai **106,7%**, yang menunjukkan kinerja sangat baik.

Selain itu, capaian Tahun 2025 telah memenuhi target akhir RPD sebesar **100%**, sehingga indikator ini telah mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian 100% pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh bangunan gedung pemerintah yang menjadi kewenangan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Hal ini mencerminkan:

- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung.
- Kepatuhan terhadap standar teknis dan regulasi bangunan gedung.
- Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sarana prasarana pemerintahan yang representatif dan layak fungsi.

Keberhasilan ini turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan fasilitas pemerintahan yang memadai.

Permasalahan / Kendala yang Dihadapi

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, yaitu:

- **Keterbatasan anggaran**, sehingga tidak seluruh bangunan yang memerlukan pemeliharaan atau rehabilitasi dapat ditangani secara optimal.
- **Terbatasnya jumlah SDM yang berkompeten**, khususnya dalam bidang perencanaan teknis, pengawasan lapangan, dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.

Strategi Mengatasi Permasalahan

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, strategi yang dilakukan antara lain:

- **Optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD**, termasuk dukungan APBN dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi gedung.
- **Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan**, termasuk penguatan sistem pengawasan dan manajemen konstruksi.
- Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan penguatan kapasitas aparatur di bidang bangunan gedung.

Kesimpulan Evaluatif

Secara keseluruhan, kinerja indikator Persentase Bangunan Gedung dan Arsitektur Prasarana Pemerintah yang Sesuai Standar pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian melampaui target dan telah memenuhi target akhir RPD. Ke depan, fokus kebijakan tidak hanya pada pembangunan baru, tetapi juga pada pemeliharaan berkelanjutan agar kualitas gedung tetap terjaga dan mampu menunjang pelayanan publik secara optimal di Kabupaten Empat Lawang.

Sasaran Strategis 3.6

Meningkatnya Peluang Investasi Daerah

3.6.1. Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	Persentase	7	1	14,3

Sumber: DPMPTSP

Realisasi Investasi di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2025 sebesar Rp 34.156.691.362 atau 1% dari target tahun 2025 sebesar Rp. 250.000.000.000 atau 7%. Adapun di mengalami penurunan sebesar -3,02 % jika dibandingakan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	RUMUS/PERSAMAAN	Realisasi Investasi 2024	Target Investasi 2025	Realisasi Investasi 2025	% Capaian 2025	% Peningkatan Investasi
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Persentase Peningkatan Investasi = ((Realisasi investasi tahun ke-n) - Realisasi investasi Tahun ke n-1)) / (Realisasi investasi Tahun ke n-1)	35.221.866.515	250.000.000.000	34.156.691.362	13,66%	-3,02%

jumlah Investasi Tahun 2024	**35.221.866.515**
Jumlah Investasi Tahun 2025	**34.156.691.362**

Perhitungan Realisasi Investasi dijelaskan sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Investasi = ((Realisasi investasi tahun ke-n) - Realisasi investasi Tahun ke n-1)) / (Realisasi investasi Tahun ke n-1)

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang pada tahun anggaran 2025 diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Berikut :

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Tahun 2025

N0.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian tahun 2025
1	Realisasi Investasi	Nilai	250 Miliar	34,1 M	13,66 %

Pada tahun 2025 Target Realisasi Investasi Sebesar Rp 250.000.000.000 dan Terealisasi sebesar Rp 34.156.691.362,00 atau sebesar 13,66 % Dengan Rincian Sebagai Berikut:

REKAPITULASI REALISASI INVESTASI TAHUN 2025

No.	Nama Perusahaan	Total	Keterangan
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		
1	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	*Tidak Melapor*	LKPM
2	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA	2.336.327.593	LKPM
3	PT PERKEBUNAN NUSANTARA I	285.973.516	LKPM
4	PT KENDI ARINDO	9.675.406.958	LKPM
5	PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA	7.153.533	LKPM
6	PT INDOMARCO PRISMATAMA	2.824.514.736	LKPM
7	PT SAWIT NUSANTARA INDONESIA	13.609.911.827	LKPM
8	PT DAYA INDAH YASA	8.277.480	LKPM
9	PT ENERGI SWA DINAMIKA MUDA	*Tidak Melapor*	LKPM
10	PT EKAJAYA MULTIPERKASA	1.808.396.520	LKPM
11	PT GALEMPA SEJAHTERA BERSAMA	29.400.506	LKPM
12	PT EMPAT LAWANG ARGO PERKASA	*Tidak Melapor*	LKPM
13	PT KARYA KENCANA SENTOSA TIGA	*Tidak Melapor*	LKPM
14	PT DAYA INDAH INTISAR	90.329.688	LKPM
15	PT DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	*Tidak Melapor*	LKPM
16	PT TOWER BERSAMA	3.480.999.005	LKPM
17	PT GAMA SENTOSA JAYA	*Tidak Melapor*	LKPM
18	PT MEDCO E & P INDONESIA	*Tidak Melapor*	LKPM
19	PERUM BULOG	*Tidak Melapor*	LKPM
TOTAL		**34.156.691.362**	
	Penanaman Modal Asing (PMA)		
1	GUNUNG SAWIT SELATAN LESTARI	*Tidak Melapor*	LKPM

TOTAL	**-**	
TOTAL PMDN + PMA	**34.156.691.362,00**	

Total Investor yang ada di Kabupaten Empat Lawang sampai Dengan Tahun 2025 sebanyak 20 investor yang terdiri dari investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 19 Investor dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 1 Investor.

Realisasi Investasi di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024 sebesar Rp 35.221.866.515 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Rencana Investasi dan Realisasi Penanaman Modal Per Tahun 2024

No	NAMA PELAKU USAHA	RENCANA INVESTASI	REALISASI INVESTASI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)			
1	SAWIT NUSANTARA INDONESIA	154.000.000.000	12.051.743.838
2	NEW CENDRAWASIH GROUP	1.000.000.001	0
3	VIN PRATAMA	6.000.000.000	0
4	TOWER BERSAMA	1.000.000.000	0
5	INDOMARCO ADI PRIMA	692.474.225	0
6	INDOMARCO PRISMATAMA	-	10.942.466.615
7	ALUMAGADA JAYA MANDIRI	7.000.000.000	0
8	DAYA INDAH YASA	10.135.000.000	4.343.889
9	SAWIT MAS SEJAHTERA	140.693.000.000	0
10	DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	-	0
11	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA	1.260.413.190,00	0
12	GUNUNG SAWIT SELATAN LESTARI	127.692.334.506	0
13	PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)	-	0
14	KENDI ARINDO	15.496.200.000	6.369.365.650
15	MALEKO	2.500.000.000	0
PENANAMAN MODAL ASING (PMA)			
1	EKAJAYA MULTIPERKASA	36.737.368.440	655.461.980
2	GALEMPA SEJAHTERA BERSAMA	993.015.610.875	0
3	EMPAT LAWANG AGRO PERKASA	386.500.000.000	3.613.803.336
4	KARYA KENCANA SENTOSA TIGA	386.500.000.000	0
5	DAYA INDAH INTISAR	10.200.000.000	1.584.681.207
	TOTAL	**2.280.422.401.237**	**35.221.866.515**
	TOTAL PMDN + PMA		**35.221.866.515**

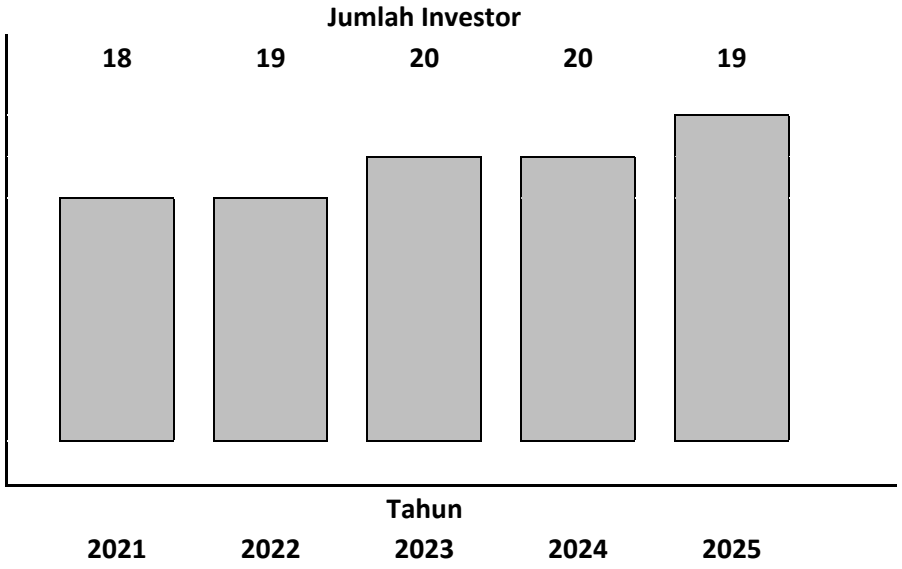
Total Investor yang ada di Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2024 sebanyak 20 investor yang terdiri dari investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 15 Investor dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 5 Investor.

Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2024

Target Realisasi Investasi Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Target 2024	Realiasi 2024	Capaian
Realisasi Investasi	220 Miliar	35 Miliar	16 %

Grafik 3.1 Perkembangan Jumlah Investor selama 5 tahun Terakhir Pada Kabupaten Empat Lawang.



Ada penurunan jumlah investor dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi penambahan nilai investasi di kabupaten empat lawang.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan terhadap Peningkatan / Penurunan Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	PERMASALAHAN	SOLUSI
Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	Realisasi Investasi	Kurangnya Daya Tarik Investor untuk Berinvestasi	Meningkatkan Inovasi Daya Tarik Investor untuk berinvestasi
		Sarana dan Prasarana yang Belum Tercukupi Dalam Penyebarluasan Informasi Investasi dan Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penyebarluasan Informasi Investasi dan Penanaman Modal Sebagai Media Promosi Potensi Investasi Daerah

Sasaran Strategis 3.7

Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan

3.7.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian	Persentase	4.22	6.21	144.76%

Sumber: BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian

Laju Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 tercatat sebesar **6,21%**. Angka ini mengalami penurunan sebesar **0,42 poin persentase** dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai **6,63%**.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mencakup seluruh kegiatan pengusahaan sumber daya alam hayati yang menghasilkan barang biologis, baik untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) maupun untuk diperdagangkan. Subsektor ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan, yang secara struktural masih menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Empat Lawang.

Meskipun mengalami perlambatan, capaian pertumbuhan sebesar 6,21% masih menunjukkan tren positif dan kontribusi yang relatif stabil terhadap pembentukan PDRB daerah. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Penurunan laju pertumbuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan iklim yang berdampak pada pola tanam dan produktivitas hasil pertanian.
- Fluktuasi harga komoditas di pasar regional maupun nasional.
- Keterbatasan infrastruktur pendukung dan akses distribusi hasil produksi.
- Dinamika pasar serta daya beli masyarakat.

Secara umum, perlambatan pertumbuhan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 masih berada dalam kategori wajar dan tidak menunjukkan kontraksi ekonomi. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap memiliki daya tahan (resilience) yang cukup baik dalam menghadapi tantangan eksternal.

Keberlanjutan pertumbuhan sektor ini ke depan sangat bergantung pada:

- Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi pertanian.
- Penguatan akses permodalan dan pemasaran hasil produksi.
- Adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana.

Dengan strategi yang tepat, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Empat Lawang diharapkan tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penopang kesejahteraan masyarakat.

(Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Empat Lawang)

3.7.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	6.885	7.77	112.85

Sumber: BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2025 mencapai **7,77%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **6,885%**. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini

mencapai sekitar **112,85%** dari target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan ini didorong oleh semakin aktifnya aktivitas perdagangan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti kopi, karet, serta komoditas unggulan lainnya, baik melalui pasar tradisional maupun jaringan distribusi antar daerah.

Beberapa faktor yang turut memperkuat kinerja sektor perdagangan antara lain:

- Stabilnya daya beli masyarakat.
- Bertumbuhnya pelaku usaha mikro, toko ritel lokal, dan UMKM.
- Kelancaran arus distribusi barang antar kecamatan.
- Meningkatnya aktivitas pasar rakyat dan mobilitas ekonomi masyarakat pasca pemulihan ekonomi.

Dengan capaian 7,77%, sektor perdagangan menunjukkan peran strategis dalam mendukung struktur ekonomi Kabupaten Empat Lawang serta menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi masyarakat berjalan dinamis dan produktif.

Analisis Kinerja

Realisasi yang melampaui target menunjukkan bahwa perencanaan ekonomi daerah telah cukup adaptif terhadap dinamika pasar. Sektor perdagangan juga memiliki efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor lainnya, terutama pertanian dan jasa transportasi.

Keberhasilan ini perlu dijaga dengan memastikan stabilitas pasokan barang, kelancaran distribusi, serta penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perdagangan lokal.

Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan ke depan, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. **Promosi potensi daerah kepada investor**, khususnya di sektor perdagangan dan distribusi. Pemerintah daerah perlu menyediakan informasi investasi yang komprehensif dan transparan.
2. **Penyederhanaan proses perizinan usaha**, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik minat penanaman modal di Kabupaten Empat Lawang.

3. **Peningkatan dan pembangunan infrastruktur pendukung**, terutama pasar rakyat, jalan distribusi, serta fasilitas transportasi yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa.
4. **Penguatan UMKM dan pedagang lokal**, melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta digitalisasi perdagangan.

Dengan strategi tersebut, sektor perdagangan diharapkan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin kuat secara struktural dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang secara konsisten.

3.7.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri	Persentase	10.20	5.11	50.10

Sumber: BPS

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri Kabupaten Empat Lawang pada Tahun 2025 tercatat sebesar **5,11%**, dari Target **10.20%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **50,10%** dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri tetap mengalami pertumbuhan positif, namun belum mampu mencapai target yang direncanakan. Kondisi ini selaras dengan struktur ekonomi Kabupaten Empat Lawang yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang secara optimal.

Komoditas unggulan daerah seperti kopi dan karet sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambah belum sepenuhnya dinikmati di dalam daerah. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB.

Beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan sektor industri antara lain:

- Belum optimalnya hilirisasi komoditas unggulan daerah.
- Minimnya investasi industri skala menengah dan besar.

- Keterbatasan infrastruktur pendukung industri.
- Dukungan teknologi, inovasi, dan modernisasi peralatan produksi yang masih terbatas.

Analisis Kinerja

Realisasi sebesar 5,11% mencerminkan bahwa sektor industri memiliki potensi pertumbuhan, namun membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Capaian 50,10% terhadap target juga menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target kinerja agar lebih realistis dan berbasis pada kondisi riil perekonomian daerah.

Sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada sektor primer.

Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk mendorong percepatan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Empat Lawang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas lokal**, guna menciptakan nilai tambah di dalam daerah dan mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah.
2. **Penguatan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)** melalui pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produk, standarisasi, serta akses pembiayaan.
3. **Penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha**, guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
4. **Promosi investasi industri secara aktif**, termasuk penyediaan informasi peluang investasi yang transparan dan terintegrasi.
5. **Dukungan pemasaran produk industri**, melalui partisipasi dalam pameran, digitalisasi UMKM, serta kemitraan dengan pelaku usaha di luar daerah.

Dengan strategi tersebut, sektor industri diharapkan mampu tumbuh lebih cepat, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang secara berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3.8

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.8.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja		Capaian Tahun 2025			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73.13	65,85	90,04

Sumber: KemenLHK

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun ada beberapa tujuan yang memang belum dapat dicapai sepenuhnya karena adanya keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia. IKU yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang pada Rencana Pembangunan Daerah periode 2021-2026 terdiri atas satu indikator yaitu IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup) dengan Target pada Tahun 2024 adalah sebesar 73,13.

Jika dibandingkan dengan Target yg ditetapkan Capaian realisasi IKLH pada Tahun 2024 tentu masih sangat rendah yaitu sebesar 65,85 namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Empat Lawang terjadi peningkatan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

   Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan Kualitas Air dimana pada tahun 2023 Nialai IKA adalah 54, 44 sedangkan pada tahun 2024 adalah 55,45

2. Indeks Kualitas Udara

   Pada Tahun 2024 terjadi Peningkatan Kualitas Udara dimana pada Tahun 2023 nilai IKU Kabupaten Empat Lawang adalah 92,64 sedangkan pada Tahun 2024 adalah 93,24

3. Indeks Tutupan Lahan

   Pada Tahun 2024 juga terjadi peningkatan pada kualitas Tutupan Lahan dari sebelumnya sebesar 32,89 pada Tahun 2024 menjadi 33,06.

Masih Rendahnya capaian IKU dikarenakan beberapa faktor antara lain yaitu :

1. Rendahnya persentase kawasan hutan
2. Alih Fungsi Kawasan Hutan
3. Rendahnya kualitas kawasan lindung
4. Belum adanya RTH (Kebun Raya atau Taman Kehati)
5. Masih rendahnya pengurangan timbulan sampah
6. Rendahnya partisipasi Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan beberapa program kegiatan prioritas yaitu:

a. Program Pengelolaan Persampahan



Gambar 3. 6 Program Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024 melakukan pengelolaan kegiatan persampahan secara swakelola dengan anggaran kegiatan sebesar Rp. 3.132.139.000 dari anggaran tersebut pelayanan persampahan di dua kecamatan yaitu kecamatan pendopo dan kecamatan Tebing Tinggi dapat terlaksana selama 12 bulan dengan sarana dan prasarana persampahan berupa 4 unit kendaraan dumtruck, 3 unit bentor, 1 unit Amroll, dengan didukung personil harian lepas sejumlah 500 an orang lebih. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi suatu tantangan dalam Pengelolaan Sampah, masih kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan dalam Pengelolaan Sampah terutama di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi sebagai ibu Kota Kabupaten, keterbatasan pendanaan yang bersumber dari APBD menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui Dinas Teknis untuk melakukan Penambahan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang bekerja sama dengan unit Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Namun pada Tahun 2024 tidak dapat terealisasi, sehingga untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hanya berpedoman pada data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor S-274/SGTPPKL/PEHKT/DTN.0.2/B/12/2024 Tanggal 4 Desember 2024 perihal Penyampaian Hasil Nilai IKLH Tahun 2024.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Jumlah Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 yaitu sebesar **Rp. 1.480.624.922.419,00** dengan Realisasi Pendapatan sebesar **Rp. 1.098.778.612.464,40** sedangkan Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar **Rp. 1.494.093.172.356,00** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 1.096.588.488.724,00**

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%	Nama OPD
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	290.991.100,-	129.000.000,-	69,38	Disdukcapil
		2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.999.940,-	79.025.000,-	112,8	Disdukcapil
		3	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.315.026.180.00,-	5.932.094.096.00,-	93,93	Bag. KesRa dan Bag. Tapem
		Total		**8.300.578.420,-**	**2.298.888.997,-**	**21,6**	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.144.925.740,-	607.813.100,-	54,6	Bappeda
		2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.101.095.060,-	0	0	Bappeda
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	253.296.915.863,-	62.624.150.523,-	29,39	Bappeda

		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.548.119.500,-	1.786.274.192,-	57,9	Bappeda
		Total		**259.946.133.423,-**	**65.018.237.815,-**	**30,12**	
3	MENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		577.420.600,-	620.058.200,-	126,9	Diskominfo
		Total		**577.420.600,-**	**620.058.200,-**	**126,9**	
4	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.105.305.558,-	40.164.659.925,-	62,05	Dinkes
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	438.074.000,-	215.308.000,-	55,62	Dinkes
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.122.131.000,-	6.448.714.909,-	63,48	PUPR
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	349.652.500,-	228.638.000,-	32,52	PUPR
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.821,914,900,-	866.751.277,-	63,3	PERKIM
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.168.496.000,-	881.499.000,-	238,3	PERKIM
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.486.065.000,-	18.757.283.755,-	66,58	PERKIM
		Total		**105.876.170.807,-**	**67.562.854.866,-**	**83,121**	
5		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	79.583.719.205,-	72.618.029.425,-	91,24	Dinas Pendidikan

	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAERAH	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	365.000.000,-	300.000.000,-	82,19	Dinas Pendidikan
		3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.203.030.000,-	3.281.157.000,-	63,06	Dinas Pendidikan
		Total		**85.151.749.205,-**	**76.199.186.425,-**	**89,39**	
6	MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	150.500.300,-	75.000.000,-	49,83	Disnaker
		2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	428.340.000,-	440.762.016,-	102,9	DPPPA
		Total		**578.840.300,-**	**515.762.016,-**	**89,10**	
7	MENINGKATNYA PELUANG INVESTASI DAERAH	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	88.014.000,-	0	0	DPMTSP
		Total		**88.014.000,-**	**0**	**0**	
8	MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGGULAN	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.861.575.200,-	1.907.652.431,-	49,48	Dinas Pertanian
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	10.757.457.199,-	6.531.084.000,-	60,71	Dinas Pertanian

		3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	297.885.500,-	297.330.500,-	99.81	Disperindag
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	184.000.500,-	130.884.128,-	71,13	Disperindag
		5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	416.839.000,-	211.419.400,-	50,71	Disperindag
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	40.000.000,-	39.856.600,-	99,64	Disperindag
		Total		**15.557.757.399,-**	**9.118.227.059,-**	**58,60**	
9	MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	179.116.000,-	0	0	DLH
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	397.720.728,-	0	0	DLH
		3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29.703.000,-	29.497.000,-	99,30	DLH
		4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	71.960.000,-	10.860.000,-	15,09	DLH
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.132.139.000,-	2.885.274.800,-	92,11	DLH
		Total		**3.810.638.728,-**	**2.925.631.800,-**	**76,77**	

10	PENGURANGAN BEBAN RUMAH TANGGA MISKIN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	147.785.900,-	13.472.000,-	9,11	PERKIM
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	299.300.000,-	264.606.800,-	88,40	DINSOS
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	244.423.000,-	237.110.000,-	97	DINSOS
		4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.697.704.600,-	1.208.613.313,-	71,19	DPMD
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	262.020.000,-	612.011.600,-	233,5	Dinas Koperasi & UKM
		Total		**2.651.233.500,-**	**2.335.813.713,-**	**88,10**	
11	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX-TRANSMIGRASI	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	80.000.000,-	79.115.200,-	98,89	Disnaker
		Total		**80.000.000,-**	**79.115.200,-**	**98,89**	
12	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DESA	1	PROGRAM PENATAAN DESA	100.000.000,-	96.940.000,-	96,94	DPMD
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	25.000.000,-	24.731.600,-	91,72	DPMD

		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	282.699.000,-	256.604.838,-	90,77	DPMD
		Total		**487.699.000,-**	**457.391.638,-**	**93,78**	
13	TERKENDALINYA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	327.921.000,-	327.921.000,-	100	Disperindag
		2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.913.769.200,-	1.711.292.921,-	58,73	Ekobang & BarJas
		Total		**3.241.690.200,-**	**2.039.213.921,-**	**62,90**	
14	MENINGKATNYA KEMUDAHAN AKSES TRANSPORTASI ANTAR WILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.634.750.000,-	2.452.175.111,-	**67,46**	DISHUB
		Total		**7.189.615.076,-**	**3.360.657.154,-**	**46,74**	
15	MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	83.986.834.830,-	88.188.207.203,-	105	PUPR
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	15.704.793.550,-	8.572.250.369,-	54,58	PUPR
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	248.132.893.100,-	170.823.760.757,-	68,84	PUPR
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.879.432.000,-	2.116.165.459,-	112,5	PUPR
		Total		**347.824.521.480,-**	**267.584.218.329,-**	**76,93**	

Tabel 3. 11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Nama OPD
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	100,9	21,6	Disdukcapil
		2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Disdukcapil
		3	PROGRAM PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			Bag. KesRa
		Total		**79,3**		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	64,32	30,12	Bappeda
		2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			Bappeda
		3	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Bappeda
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Bappeda
		Total		**34,2**		
3	MENINGKATNYA KAPABILITAS BIROKRASI	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	101	126,9	Diskominfo
		Total		**25,9**		
4	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	107	83,12	Dinkes
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Dinkes

		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			PUPR
		4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			PUPR
		5	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			PERKIM
		6	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			PERKIM
		7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			PERKIM
		Total		**23,88**		
5	MENINGKATNYA KUALITAS DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DAERAH	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	21,42	89,39	Dinas Pendidikan
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Dinas Pendidikan
		3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
		Total		**67,97**		
6	MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	100	89,10	Disnaker

		2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DPPPA
		Total		**10,9**		
7	MENINGKATNYA PELUANG INVESTASI DAERAH	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	26,7	0	DPMTSP
		Total		**26,7**		
8	MENINGKATNYA LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGGULAN	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Na	49,48	Dinas Pertanian
		2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		60,71	Dinas Pertanian
		3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		99.81	Disperindag
		4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		71,13	Disperindag
		5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		50,71	Disperindag
		6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		99,64	Disperindag
		Total		**Na**		
9	MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	90,04	76,77	DLH
		2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
		3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			

		4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
		5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
		Total		**13,27**		
10	PENGURANGAN BEBAN RUMAH TANGGA MISKIN	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	31,4	88,10	PERKIM
		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			DINSOS
		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			DINSOS
		4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			DPMD
		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			Dinas Koperasi & UKM
		Total		**56,7**		
11	MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT EX-TRANSMIGRASI	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	98,89	Disnaker
		Total		**1,11**		
12	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN DESA	1	PROGRAM PENATAAN DESA	105,9	93,78	DPMD
		2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			

		3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
		Total		**12,12**		
13	TERKENDALINYA HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	18,5	62,90	Disperindag
		2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			Ekobang & BarJas
		Total		**44,4**		
14	MENINGKATNYA KEMUDAHAN AKSES TRANSPORTASI ANTAR WILAYAH	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100	46,74	DISHUB
		Total		**53,26**		
15	MENINGKATNYA LAYANAN INFRASTRUKTUR DALAM KONDISI BAIK	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	85,875	76,93	PUPR
		2	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
		3	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
		Total		**8,945**		



BAB IV

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 15 (Lima Belas) sasaran dan 23 Indikator Pencapaian Kinerja Tahun 2025, dari Perencanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024-2026. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis dengan 23 indikator pencapaian kinerja sasaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Keberhasilan di atas 100% sebanyak 7 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
2) Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 8 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
3) Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 0 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
4) Capaian di bawah 50% sebanyak 3 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
5) Capaian yang tidak terealisasi sebanyak 5 indikator dari jumlah indikator kinerja sasaran.
6) Capaian yang belum atau masih menunggu *publish* data sebanyak 0 indikator kinerja sasaran

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam rangka Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

1. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur terhadap implementasi SAKIP secara menyeluruh dari tingkat bawah hingga pimpinan.
2. Menyelaraskan indikator kegiatan dalam penyusunan RENJA Perangkat Daerah dengan cascading kinerja masing-masing Perangkat Daerah.
3. Mengoptimalkan pemantauan dan pengendalian melalui sistem pelaporan kinerja berbasis elektronik.
4. Meningkatkan sinergi dan kesamaan persepsi antara Inspektorat, BAPPEDA, dan Bagian Organisasi dalam perumusan serta evaluasi capaian kinerja.
5. Memastikan kesesuaian kinerja Perangkat Daerah dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan RPD, serta memperkuat komitmen pimpinan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Diperlukan komitmen dan dukungan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Empat Lawang agar implementasi SAKIP tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan laporan kinerja di masa mendatang.

Rr Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun tantangan dalam pencapaian kinerja, serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Tebing Tinggi, Maret 2026
Bupati Empat Lawang,

JONCIK MUHAMMAD



LAMPIRAN

LAMPIRAN

LKjIP Kabupaten Empat Lawang Tahun 2025
Pengukuran Kinerja (PK)

No	Tujuan	Indikator Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Penanggung Jawab
1	2	3		4	5	6	7	8	9		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai SAKIP	Nilai	65,30	63,96	97,95	Bappeda, Inspektoat dan Ortala
					1.1.2	Persentase Peningkatan IPKD	%	0,010	0,07	70	Bappeda dan BPKAD
					1.1.3	Indeks Integritas Daerah (SPI)	Indeks	68,74	66,54	96,79	Inspektorat
			1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	4,06	4,12	101,48	Sekretariat Daerah bagian Ortala
			1.3	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1.3.1	Indeks SPBE	Indeks	2,5	2,32	94	Diskominfo
2	Meningkatnya Pembangunan Manusia Dan Kesejahteraan Masyarakat Empat Lawang	Indeks Pembangunan Manusia	2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1.1	Angka harapan hidup	Angka	65,72	70,93	107	DINKES
					2.1.2	Nilai kabupaten sehat	Nilai	55	58	103	DINKES

		Indeks Pembangunan Gender	2.2	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Daerah	2.2.1	Indeks pendidikan	Indeks	0,615	0,529	86	DIKBUD
		Tingkat Kemiskinan	2.3	Meningkatnya Standar Hidup Layak	2.3.1	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	Rupiah	9,970	9,970	100	Disnakertrans, DP3A
		Gini Rasio	2.4	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	2.4.1	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	%	40	11,8	33	DINSOS, KOPERASI DAN UKM
3	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Lingkungan Hidup	Perumbuhan Ekonomi	3.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	3.1.1	Presentase Desa di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	%	80	100	125	Disnakertrans
		Persentae Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3.2	Meningkatnya Pembangunan Desa	3.2.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6862	0,6984	101,78	DPMD
			3.3	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	3.3.1	Tingkat Inflasi	%				Sekretariat Daerah
			3.4	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	3.4.1	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	Rasio	0,80	0,80	100	DISHUB
			3.5	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	3.5.1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	55,893	45,43	81,29	PUPR
					3.5.2	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	67,39	57,33	85,07	PUPR
					3.5.3	Tingkat Konektivitas Jalan	%	27,20	24,9	91,54	PUPR
					3.5.4	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah Kabupaten Yang Sesuai Standar	%	93,75	100	100	PUPR
			3.6	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	3.6.1	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten	%	7	1	14,3	DPMPTSP

			3.7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	3.7.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Pertanian	%	4,29	6,21	144,76	Dinas Pertanian
					3.7.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Perdagangan	%	6,885	7,77	112,85	DISPERINDAG
					3.7.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor Industri	%	10,20	5,11	50,10	DISPERINDAG
			3.8	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	3.8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks				DLH

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG LkjIP
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	1.1	Nilai SAKIP	Nilai	65.30
		1.2	Persentase Peningkatan IPKD	Persentase	0.010
		1.3	Indeks Integritas Daerah (SPI)	Indeks	68,74
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.1	Indeks Pemantauan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks	4.06
3.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	3.1	Indeks SPBE	Indeks	2.5
4.	Pengurangan Beban Rumah Tangga Miskin	4.1	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Bantuan Program Pemerintah	Persentase	40
5.	Meningkatnya Standar Hidup Layak	5.1	Pengeluaran Per Kapita Rumah Tangga	Rupiah	9.970
6.	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Daerah	6.1	Indeks Pendidikan	Indeks	0.615
7.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	7.1	Angka Harapan Hidup	Angka	65.72
		7.2	Nilai Kabupaten Sehat	Nilai	50
8.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Unggulan	9.1	LPE PDRB Sektor Pertanian	Persentase	4.29
		9.2	LPE PDRB Sektor Perdagangan	Persentase	6.885
		9.3	LPE PDRB Sektor Industri	Persentase	10,20
10.	Meningkatnya Peluang Investasi Daerah	10.1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Di Kabupaten	Persentase	7
11.	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	11.1	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	Persentase	55.893
		11.2	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	Persentase	67.39

		11.3	Tingkat Konektivitas Jalan	Persentase	27,20
		11.4	Persentase Bangunan Gedung Dan Arsitektur Prasarana Pemerintah Dan Kepentingan Strategis Pemerintah kabupaten yang sesuai standar	Persentase	93,75
12.	Meningkatnya Kemudahan Akses Transportasi Antar Wilayah	12.1	Ratio Konektivitas Transportasi Wilayah	Ratio	0.80
13.	Terkendalinya Harga Barang Kebutuhan Pokok	13.1	Tingkat inflasi	Persentase	
14.	Meningkatnya Pembangunan Desa	14.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6862
15.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Ex-Transmigrasi	15.1	Presentase Desa Di Wilayah Ex-Transmigrasi yang Masuk Kategori Berkembang	Persentase	80

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
INSPEKTORAT
Jln. Guru-Guru Komplek Perkantoran KM 3,5 Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi
Kode Pos 31453

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanggungjawab kami terbatas pada hasil reviu berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Hasil Reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Rekomendasi Hasil Reviu Sebagaimana terlampir.

Demikian hasil reviu ini disampaikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 16 Maret 2026

INSPEKTUR
KABUPATEN EMPAT LAWANG

PEMERINTAH KABUPATEN INSPEKTORAT KABUPATEN EMPAT LAWANG

YULIUS SUGIANTARA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197607272003121006